

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Alamat	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan		Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja
					No. SK	Tanggal SK		

Form A.01.01
Data Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Pendidikan Formal			Pendidikan Non Formal			Keanggotaan Komite				Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Komisaris Independen
Pendidikan Terakhir	Tanggal Kelulusan	Nama Lembaga	Jenis Pelatihan Terakhir	Tanggal Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko		

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Pejabat Eksekutif	Alamat	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat	Surat Pengangkatan	
		Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU dan PPT	Lainnya		No.	Tanggal

Form A.01.02
Data Pejabat Eksekutif BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Keanggotaan Komite

Komite Audit	Komite Pemantauan Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko
--------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------

Form A.02.00
Data Kepemilikan BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Pemegang Saham						
Nama	Alamat	Jenis	Status Pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan	Ultimate Shareholders

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Informasi	Keterangan
Nomor akta pendirian	05
Tanggal akta pendirian	09-02-2006
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	03
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	09-08-2024
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	8/73/KEP.GBI/2006
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	06-10-2006
Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan usaha	06-10-2006
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	Perbankan
Tempat kedudukan	Klaten

PT. BPR Wuni Artha Utama didirikan pada tanggal 09 Februari 2006 berdasarkan akta pendirian No.05 yang dibuat oleh Notaris Klaten, saudari Primastuti Rahayuningsih, SH, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 15 Maret 2006 dengan Nomor : C-07659HT.01.01. Tahun 2006, dan izin Persetujuan Prinsip dari Bank Indonesia No. 8/82/DPBPR/IDABPR/Slo Tanggal 7 Februari 2006, dan izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia Nomor : 8/73/KEP.GBI/2006 Tanggal 6 Oktober 2006.

Form A.03.02
Ikhtisar Data Keuangan Penting

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Rekening	Jumlah
---------------	--------

Form A.03.03
Laporan Kualitas Aset Produktif

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Aset	Posisi Tanggal Laporan					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Surat Berharga						
Penempatan pada bank lain						
Kredit yang diberikan						
a. Kepada BPR						
b. Kepada Bank Umum						
c. Kepada non bank - pihak terkait						
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait						
Penyertaan Modal						
Jumlah Aset Produktif						

Rasio Keuangan	Niali Rasio (%)
----------------	-----------------

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Kategori	Uraian
Penyebab Utama	Usaha debitur menurun dan karakter debitur jelek.
Langkah Penyelesaian	Penagihan, Take Over, dan Lelang

Jumlah kredit yang disalurkan 22.348.454.170, dengan jumlah KL 2.510.924 Diragukan 1.526.612.989 Macet 5.310.155.760. Sehingga NPL 30,60%

Form A.03.05

Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan :

- Aktivitas utama PT. BPR Wuni Artha Utama adalah sebagai lembaga intermediasi dengan menghimpun dana dari pihak-pihak masyarakat yang kelebihan dana dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.
 - i. Kredit
 - Penyaluran kredit pada tahun 2025 mengalami kenaikan dibanding pencapaian kredit tahun 2024.
 - ii. Penghimpunan Dana
 - Penghimpunan dana berupa Deposito tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun 2024. Sementara untuk Tabungan mengalami kenaikan dibanding tahun 2024.
- Jumlah Aset PT BPR Wuni Artha Utama pada tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun 2024.
- Pada Tahun 2025 PT BPR Wuni Artha Utama tidak ada penambahan atau pengurangan kegiatan usaha.
- Pada tahun 2025 jumlah kantor PT. BPR Wuni Artha Utama ada 1 (satu) yaitu 1 (satu) Kantor Pusat yang berlokasi di Jl Raya Klaten- Solo, Meger, Ceper, Klaten dengan status sewa 3 tahun atau jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2028.

Perubahan Penting Lainnya :

- Pada tahun 2025 tidak terdapat penambahan modal disetor dari pemegang saham.
- Terdapat perubahan susunan kepengurusan yaitu pemberhentian Direktur atas nama Bapak Febry Nurcahyo Alfath, S.E. pada tanggal 31 Juli 2025 dikarenakan penolakan atas pencalonan Direktur YMFK dari OJK, yang menyebabkan kekosongan jabatan Direktur YMFK, sehingga berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan secara umum.
- Terdapat perubahan susunan kepengurusan yaitu pengisian jabatan Direktur Utama baru atas nama Bapak Pebruono, S.E., M.M. mulai tanggal 09 Juli 2025, sehingga berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan secara umum.
- Di Tahun 2025 tidak ada perubahan- perubahan penting lain mengenai perubahan penting BPR dan/atau kelompok usaha BPR yang terjadi di PT BPR Wuni Artha Utama yang mempengaruhi kinerja dan operasional BPR terkait kondisi perekonomian dan/atau kebijakan pemerintah.

Form A.04.00

Strategi dan Kebijakan Manajemen

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Strategi dan Kebijakan Manajemen yang digunakan dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPR, termasuk informasi mengenai manajemen risiko :

1. Usaha penghimpunan dana dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
 - a. Meningkatkan dan mempererat hubungan (Maintenance) dengan nasabah exist agar bersedia menempatkan dana lebih banyak di BPR dengan cara memberikan souvenir.
 - b. Ekspansi mencari nasabah baru dengan cara memperbanyak promosi (Iklan, brosur), Canvassing dan meminta referensi dari nasabah lama/ exist.
 - c. Memasarkan tabungan kolektif melalui sekolah, perkantoran dan perusahaan yang berlokasi disekitar BPR.
 - d. Service Excellence/ Service terhadap nasabah ditingkatkan sehingga membuat nasabah merasa aman dan nyaman menempatkan dana di BPR.
 - e. Cross selling, dengan cara menawarkan pembukaan rekening terhadap nasabah kredit.
 - f. Menawarkan kepada nasabah tabungan jasa payment point.

Pada posisi akhir bulan Desember 2025 Deposito mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 karena adanya pencairan deposito dari masyarakat.

2. Memperhatikan adanya persaingan baik dengan lembaga keuangan Bank maupun Non Bank, kami membuat strategi marketing kredit :
 - a. Melakukan Top up terhadap nasabah kredit Exist secara selektif.
 - b. Ekspansi mencari nasabah baru dengan cara memperbanyak promosi (Iklan, brosur), Canvassing dan meminta referensi dari nasabah lama/exist.
 - c. Service Excellence dengan Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat.
 - d. Menentukan suku bunga kredit yang kompetitif.
 - e. Memasarkan kredit karyawan secara kolektif pada beberapa perusahaan disekitar lokasi BPR

3. Identifikasi & Pengendalian Risiko

1). Risiko Kredit

- Proses pemberian kredit sesuai SOP yang berlaku yang ada dimana permohonan kredit yang ada diproses dengan dimulai dari pengumpulan data sekaligus verifikasi data dan informasi lingkungan oleh Account Officer, kemudian dilanjutkan dengan permohonan SLIK OJK, di Lembar permohonan SLIK OJK yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Debitur dan Pasangan dimana lembar permohonan harus sepersetujuan Direktur Utama. Bilamana Hasil SLIK sudah sesuai dengan standar ketentuan maka akan dilanjutkan dengan kunjungan di Kediaman, Usaha, dan Jaminan oleh Komite Kredit sesuai dengan pemegang limit BMPK. Jaminan BPKB kendaraan bermotor maka wajib dilakukan pengecekan BPKB & STNK dengan Fisik dan Rangka kendaraan yang dijamin. Untuk Nilai Pasar dicarikan informasi pada harga di Dealer dan/atau informasi internet. Untuk jaminan SHM wajib dilakukan pengecekan lokasi dan fisik jaminan, kemudian cek lingkungan terkait jaminan serta informasi nilai pasar, transaksi terakhir, dan/atau informasi harga tanah dari kantor kelurahan setempat dan kemudian dilakukan pengecekan oleh Notaris. Bilamana Factor 5C telah terpenuhi maka akan dilakukan pengambilan keputusan oleh Komite Kredit sesuai dengan batas limit BMPK yang dipegang. Alur Proposal Kredit dari Account Officer dan/atau Koordinator Pemasaran diusulkan kepada PE Pemasaran Dana & Kredit kemudian dilanjutkan persetujuan oleh Direktur Utama. Sesuai dengan keputusan Direktur Utama baik disetujui atau ditolak harus dibuatkan SK kemudian diberitahukan kepada calon debitur. Apabila diterima dan calon debitur setuju dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam SK, maka dilanjutkan

dengan pembuatan perjanjian kredit sekaligus disiapkan surat pengantar notaris untuk pengikatan jaminan.

- Sebelum calon debitur menandatangani PK, maka seluruh pasal dalam perjanjian wajib dibacakan lebih dahulu oleh notaris atau oleh admin kredit kepada calon debitur dengan jelas, sehingga calon debitur tahu berapa plafond kreditnya, berapa biayanya kemudian kapan dan berapa harus mengangsur setiap bulan sampai jatuh tempo. Dan kepada debitur diberikan kartu angsuran sebagai pegangan debitur yang dibawa saat mengangsur.
- Setiap 2 bulan setelah realisasi, PE Audit Intern melakukan on the spot ke debitur tentang penggunaan kredit.
- Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) setiap akhir bulan dibentuk sesuai ketentuan.
- Untuk debitur menunggak terus ditagih dengan membawa surat tagihan dan mencari solusi penyelesaiannya. Apabila terjadi penurunan kualitas kredit, maka penagihan dilakukan lebih intensif dan diberikan Surat Peringatan I sampai dengan ke III dan dilanjutkan dengan lelang jaminan melalui KPKNL maupun Pengadilan, penjualan jaminan secara sukarela oleh Debitur.
- Upaya reminder kepada debitur sebelum jatuh tempo angsuran supaya angsuran masuk sesuai jadwal angsuran.
- Untuk kredit yang macet tetap dilakukan penagihan. Namun untuk beberapa kasus diusulkan hapus buku dan terus diupayakan penagihannya, termasuk kredit pension dan umum dengan plafon kecil.
- Dengan demikian pemberian kredit sesuai dengan SOP dan ketentuan-ketentuan yang ada diharapkan resiko bisa diminimalisir. Bahkan kalau terjadi resiko macet bisa diselesaikan dengan cara lelang melalui Pengadilan & KPKNL, penjualan jaminan secara sukarela.

2). Risiko Operasional

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, PT. BPR Wuni Artha Utama telah mempunyai struktur organisasi yang bekerja sesuai job descriptionnya masing-masing. Dalam menjalankan fungsinya sudah disiapkan SOP di setiap lini dengan mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku disamping kebijakan-kebijakan Direksi.

Dengan berfungsinya PE Kepatuhan dan PE Audit Internal maka kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan operasional bisa diketahui secara dini dan segera diadakan penyesuaiannya.

Berbagai macam resiko operasional antara lain :

a. Resiko SDM

- Dalam recruitmen karyawan, Bank selalu melakukan langkah-langkah antara lain referensi calon karyawan, wawancara, praktek lapangan, penempatan sesuai dengan jobnya.
- Dalam menjalankan tugasnya setiap hari, karyawan khususnya marketing membuat buku kunjungan yang dipertanggungjawabkan kepada PE Pemasaran.
- Evaluasi kinerja setiap bulan sekali.
- Setiap pagi sebelum memulai kegiatan, diadakan doa bersama dengan harapan bahwa semua karyawan dalam bekerja akan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Resiko IT

Untuk mengantisipasi terjadinya resiko hilangnya data, Bank selalu melakukan Back Up data setiap hari & menyimpannya pada harkdisk eksternal. Terdapat 2 (dua) unit Hardisk Eksternal, untuk penyimpanan Hardisk eksternal setiap harinya 1 (satu) unit dibawa pulang oleh PE Pemasaran Kredit & Dana dan yang 1 (satu) unit disimpan di dalam Brankas.

c. Resiko penghimpunan dana

Kepada nasabah setiap akhir bulan secara rutin diberitahukan saldo tabungan 25 nasabah terbesar melalui sms dan surat pemberitahuan.

d. Resiko Arus Kas

- Bank telah bekerjasama dengan Asuransi Wahana Tata untuk mengcover resiko uang dalam kasir, uang dalam brankas, uang dalam perjalanan ketika setor atau ambil ke Bank

lain. Terdapat 2 (dua) buah Kunci brankas yang setiap harinya dibawa oleh Direktur Utama dan PE Pemasaran Kredit & Dana.

- Keamanan file kredit selama ini disimpan di filling cabinet yang dikelola oleh Admin Kredit, siapapun yang akan pinjam harus melalui Admin Kredit. Untuk perjanjian kredit asli disimpan didalam brankas.
- Keamanan file tabungan/ aplikasi tabungan selama ini disimpan di filling cabinet yang dikelola oleh Admin Dana, siapapun yang akan pinjam harus melalui Admin Dana.

e. Resiko Pembukuan

- Untuk mengantisipasi resiko salah input, setiap hari mutasi baik kas maupun non kas diperiksa oleh PE Operasional dan PE Audit Intern.

3). Risiko Kepatuhan

PT BPR Wuni Artha Utama telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku serta menjalankan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan regulasi yang berlaku. PE Kepatuhan aktif dalam penerapan fungsi kepatuhan secara menyeluruh. Seluruh aktivitas dan produk BPR telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan/ ketentuan yang berlaku, tetapi masih terdapat kekosongan jabatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

4). Risiko Likuiditas

PT BPR Wuni Artha Utama telah memiliki aset liquid berkualitas tinggi yang cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo, sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil cukup signifikan, cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal dan skenario krisis, arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan baik, sehingga aktivitas bisnis yang dijalankan BPR serta kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR tergolong rendah selama periode tertentu pada masa datang.



PT. BPR WUNI ARTHA UTAMA

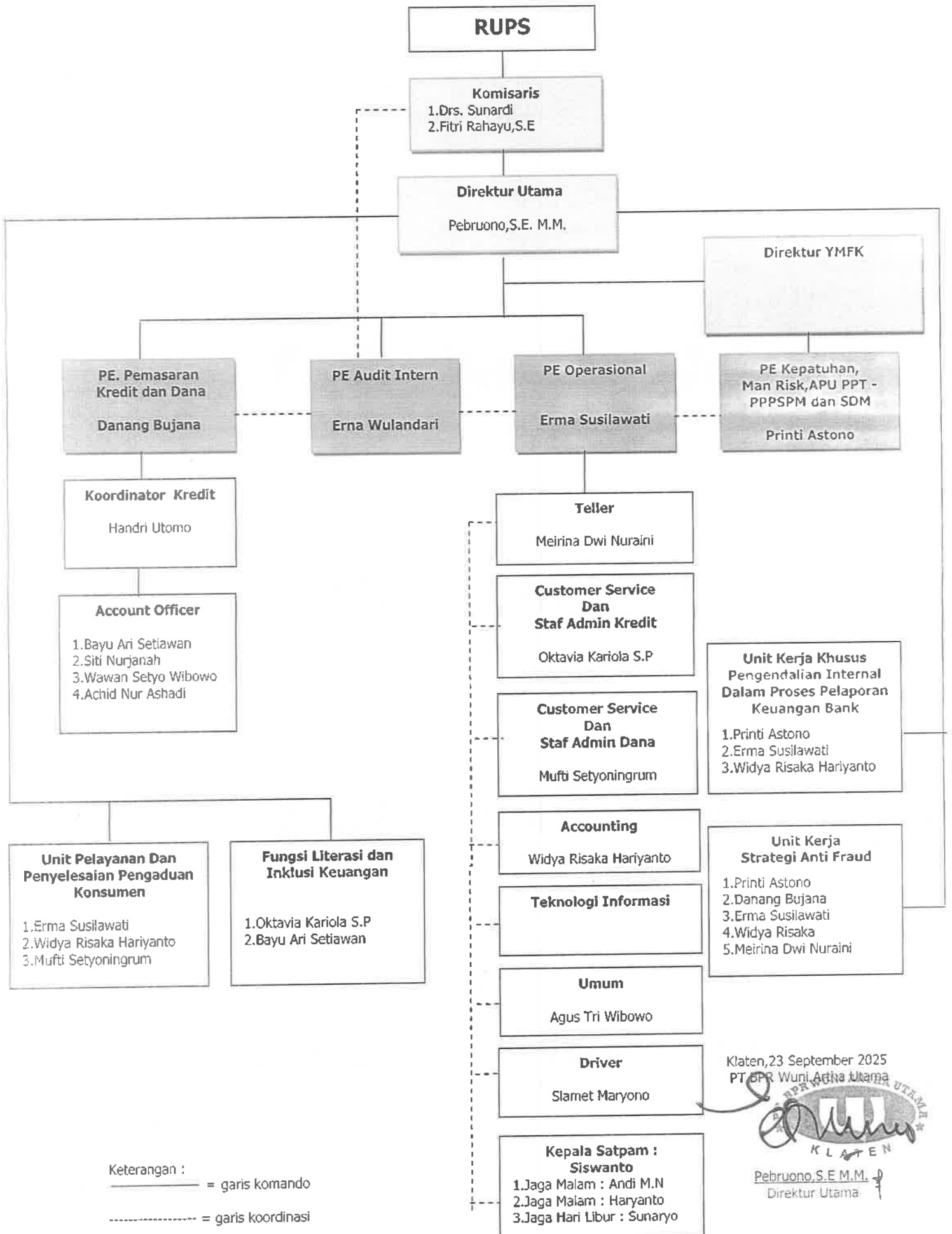
Jl. Raya Klaten - Solo, Meger, Ceper, Klaten Telp./Fax : (0272) 331032

E-mail : wuniarthautama@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

Nomor : 145/SDM/BPR-WAU/IX/2025

Tentang Struktur Organisasi PT. BPR Wuni Artha Utama



Keterangan : _____ = garis komando

----- = garis koordinasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
01	01	Tabungan	Tabungan Umum dan Simpel
01	01	Deposito	Deposito Berjangka 06 Bulan dan 12 Bulan
02	01	Kredit	Kredit Modal Kerja, Investasi, dan Konsumtif

Form A.05.03

Teknologi Informasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Informasi mengenai Teknologi Informasi (TI) PT BPR Wuni Artha Utama mencakup perangkat keras (komponen fisik computer), perangkat lunak (Software, aplikasi), dan jaringan untuk mengelola data guna meningkatkan produktivitas dan keamanan.

Sistem operasional PT BPR Wuni Artha Utama terdapat komputer, server, dan jaringan komputer sehingga penyimpanan dan pemrosesan data secara online, menggunakan system basis data, menggunakan alat bantu operasional berupa Aplikasi Mobile untuk AO Dana dalam penghimpunan dana. Adanya system operasional teknologi informasi tersebut bertujuan untuk menangkap, menyimpan, mengolah, dan mengirimkan data.

Sistem keamanan TI berfokus pada perlindungan data dari serangan siber. Penyedia jasa TI (vendor) menyediakan layanan infrastruktur dan manajemen sistem untuk mendukung aktivitas bisnis, membantu dalam otomatisasi proses, efisiensi operasional, dan keamanan database. PT. BPR Wuni Artha Utama menjalin kerjasama dengan PT Penta Media Informasi untuk sistem operasional (corebanking) pada bulan September 2022. Meskipun masih ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi oleh vendor, namun secara umum system berjalan dengan lancar dan support untuk pembuatan Lapbul Apollo maupun laporan SLIK.

Form A.05.04

Perkembangan dan Target Pasar

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Persaingan usaha Lembaga keuangan di wilayah Klaten cukup ketat. Ada banyak BPR yang berkantor pusat di Klaten ditambah kantor cabang BPR dan Bank Umum yang beroperasi di area Klaten dan sekitarnya. Hal ini menuntut OJK melakukan pembinaan dan pengawasan agar persaingan usaha bisa berjalan dengan adil dan merata.

Masuknya bank umum dan Lembaga keuangan dengan modal kuat yang beroperasi di segmen mikro (Misal: Mandiri Mitra Usaha) dan penyaluran KUR melalui bank milik pemerintah membuat daya saing BPR menurun. Apabila BPR tidak kreatif dan kurang mendapat dukungan pemerintah, tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak BPR yang kesulitan berkembang.

Namun dengan strategi pemasaran yang kami lakukan, PT. BPR Wuni Artha Utama masih mampu menjalankan fungsi bank dengan baik yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit walaupun dengan pertumbuhan yang rendah.

Target pasar PT BPR Wuni Artha Utama mencakup UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), Individu/ Perorangan, dan Karyawan dengan menyediakan produk berupa Tabungan, Deposito dan Kredit. Target pasar UMKM dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Target pasar Individu/ Perorangan dengan melayani nasabah disekitar kantor yang membutuhkan akses layanan keuangan dengan mudah dan dekat. Target pasar Karyawan menyediakan produk kredit karyawan khusus dengan MOU pada perusahaan- perusahaan.

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Sandi Kantor	Nama Kantor	Koordinat Kantor	Alamat Kantor				Nama Pimpinan	No. Telp
			Nama Jalan dan No.	Desa/Kecamatan	Kab/Kota	Kode Pos		

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Jumlah Pegawai												Jumlah Kantor Kas	Status Kepemilikan Gedung	Jumlah Kas Mobil/Kas Terapung	Jumlah EDC		
Pegawai Tetap						Pegawai Tidak Tetap									EDC Milik Sendiri	EDC Milik BU	EDC Milik BPR Lain
S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya	S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya						

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

ATM			Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan				Jumlah Pegawai					
			Keterangan Data Kantor	Persetujuan OJK		Alamat Sebelumnya	Tanggal Pelaksanaan	Pegawai Tetap			Pegawai Tidak Tetap	
Jumlah Dikelola Sendiri	Jumlah Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR	Nama Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR		No.	Tanggal			Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana	Lainnya	Penghimpunan Dana	Penyaluran Dana

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Jenis	Kode Kantor Kas	Sandi Kantor Induk	Sandi Kantor Cabang Sebelumnya	Nama Kantor Kas	Koordinat	Alamat	Nama Pimpinan	No. Telepon
-------	-----------------	--------------------	--------------------------------	-----------------	-----------	--------	---------------	-------------

Form A.05.05
Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Keterangan Data Kantor Kas dan Kegiatan
Pelayanan Kas

Tanggal Pelaksanaan

Sandi Kantor Kendali

Tanggal Persetujuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Bank/LJK Lain/ Lembaga Lain	Jenis Kerja Sama	Uraian Kerja Sama	Tanggal Mulai Kerja Sama
SPBU 44.574.14	Kredit	Perjanjian kerjasama No:096A/Sekrt-WAU/VI/2025 masa berlaku kerjasama mulai tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2027.	08-05-2025
CV Debough	Kredit	Perjanjian kerjasama No:038/Sekrt-WAU/III/2024 masa berlaku kerjasama mulai tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2026.	28-03-2024
PT Alis Jaya Ciptatama Klaten	Kredit	Perjanjian kerjasama No:161/Sekrt-WAU/XII/2024 masa berlaku kerjasama mulai tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2026.	13-12-2024
Kantor Advokat & Konsultan Hukum Danang Sindhu Sasangka & Partners	Jasa Hukum	Perjanjian kerjasama No:171/MOU/BPR-WAU/XI/2025 masa berlaku efektif pada saat ditandatanganinya Perjanjian Pemakaian Jasa Hukum dan Surat Kuasa untuk itu dan berakhir dengan kesepakatan tertulis.	04-11-2025
PT Calmic Indonesia (Cab. Solo)	Jasa Parfum Ruangan (Hygiene Service)	Perjanjian Kerjasama No:60101291 masa berlaku kerjasama mulai tanggal 18 februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2026.	18-02-2025
SMP Negeri 2 Ceper	Tabungan Simpel	Perjanjian kerjasama No:321/BPR-WAU/X/2019 masa berlaku kerjasama mulai tanggal 16 Oktober 2019 dan berakhir atas kesepakatan bersama.	16-10-2019
CV Nariyah	Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya PPOB (Pola Payment Point Online Bank)	Perjanjian Kerjasama No:026/F/SA/CNR/IV/2018 masa berlaku kerjasama mulai tanggal 04 April 2018 berlaku satu tahun serta perpanjangan secara otomatis.	04-04-2018
PT Penta Media Informasi	Implementasi System Informasi	Perjanjian Kerjasama No:015/PKS-SLA/PM-INFO/IV/2025 masa berlaku kerjasama mulai tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2027.	13-04-2022
CV Budi Mulya Sejahtera Abadi	Jasa Sewa Mesin Foto Copy	Masa berlaku kerjasama mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.	01-01-2024
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Apex Bank Jateng	Masa berlaku kerjasama mulai tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2028.	02-10-2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Komposisi Karyawan	Jumlah
Bidang Tugas	
1. Pemasaran	
2. Pelayanan	
3. Lainnya	
Status Kepegawaian	
1. Pegawai Tetap	
2. Pegawai Tidak Tetap	
Tingkat Pendidikan	
1. S3	
2. S2	
3. S1	
4. D3	
5. SMA	
6. Lainnya	
Jenis Kelamin	
1. Laki-laki	
2. Perempuan	
Usia	
1. Usia ≤25 tahun	
2. Usia 26-35 tahun	
3. Usia 36-45 tahun	
4. Usia 46-55 tahun	
5. Usia >55 tahun	

Form A.05.07.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia - Kegiatan Pengembangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Peserta
Talkshow Governance,Risk And Compliance	07-01-2025	02	02	1	Penguatan Kinerja Sektor Jasa Keuangan Melalui GRC
Aspek Hukum Perbankan	18-07-2025	01	01	18	Pelaksanaan Ketentuan UU PT
Sosialisasi PPATK	21-08-2025	02	03	1	Perlindungan Hak dan Kepentingan Pemilik Sah Rek Perbankan
Pendidikan APU-PPT dan PPPSPM	05-09-2025	01	01	20	Penerapan dan Ketentuan APU_PPT dan PPPSPM
Evaluasi Kinerja IJK	11-09-2025	02	02	1	Mewujudkan Jawa Tengah Mapandan Tumbuh Melalui Kinerja IJK
Sosialisasi dan Refreshment Aplikasi Apolo	24-09-2025	02	03	1	Penerapan Strategi Anti Fraud melalui Pelaporan APOLO
Sosialisasi POJK dan S.P.O	28-10-2025	01	01	18	Sosialisasi S.P.O Dan Kebijakan (a.l Rahasia Bank dan PP)
Evaluasi Kinerja BPR Solo raya	07-11-2025	02	02	2	Terwujudnya Ketahanan BPR yang Kokoh dan berkualitas.
Sosialisasi RBB 2026 dan POJK	20-12-2025	01	01	18	Pemaparan RBB 2026 dan POJK Integritas Keuangan
Sosialisasi POJK dan PADK Teknologi Informasi	22-12-2025	02	03	1	Ketentuan POJK dan PADK Terbaru tentang Teknologi Informasi
Sosialisasi APOLO	30-12-2025	02	03	1	Implementasi APOLO untuk Lap Keu Berkelanjutan Penerapan Strategi Anti Fraud.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Kas dalam Rupiah		
Kas dalam Valuta Asing		
Surat Berharga		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Penempatan pada Bank Lain		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)		
-/- Provisi Belum Diamortisasi		
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi		
-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Penyertaan Modal		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Agunan yang diambil alih		
Properti Terbengkalai		
Aset Tetap dan Inventaris		
-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai		
Aset Tidak Berwujud		
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai		
Aset Antarkantor		
Aset Keuangan Lainnya		
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Aset Lainnya		
TOTAL ASET		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera		
Simpanan		
a. Tabungan		
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
b. Deposito		
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
Simpanan dari Bank Lain		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
Pinjaman yang Diterima		
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi		
-/- Diskonto Belum Diamortisasi		
Dana Setoran Modal-Kewajiban		
Liabilitas Antarkantor		
Liabilitas Lainnya		
TOTAL LIABILITAS		
EKUITAS		
Modal Disetor		
a. Modal Dasar		
b. Modal yang Belum Disetor -/-		
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio		
b. Modal Sumbangan		
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas		
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya		
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual		
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		
c. Lainnya		
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain		
Cadangan		
a. Umum		
b. Tujuan		
Laba (Rugi)		
a. Tahun-Tahun Lalu		
b. Tahun Berjalan		
TOTAL EKUITAS		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Pendapatan Operasional		
1 Pendapatan Bunga		
a Bunga Kontraktual		
i. Surat Berharga		
ii. Penempatan pada Bank Lain		
Giro		
Tabungan		
Deposito		
Sertifikat Deposito		
iii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain		
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank		
b Provisi Kredit		
i. Kepada Bank Lain		
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
c Biaya Transaksi -/-		
i. Surat Berharga		
ii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain		
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank		
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-		
2 Pendapatan Lainnya		
a Pendapatan Jasa Transaksi		
b Keuntungan Penjualan Valuta Asing		
c Keuntungan Penjualan Surat Berharga		
d Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku		
e Pemulihan CKPN		
f Dividen		
g Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		
h Keuntungan penjualan AYDA		
i Pendapatan Ganti Rugi Asuransi		
j Pemulihan penurunan nilai AYDA		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
k Lainnya		
Beban Operasional		
1 Beban Bunga		
a Beban Bunga Kontraktual		
i. Tabungan		
ii. Deposito		
iii. Simpanan dari bank lain		
iv. Pinjaman yang diterima		
1) Dari Bank Indonesia		
2) Dari Bank Lain		
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank		
4) Berupa Pinjaman Subordinasi		
v. Lainnya		
b Biaya Transaksi		
i. Kepada Bank Lain		
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
2 Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit		
3 Beban Kerugian Penurunan Nilai		
a. Surat Berharga		
b. Penempatan pada Bank Lain		
c. Kredit yang Diberikan		
i. Kepada Bank Lain		
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
d. Penyertaan Modal		
e. Aset Keuangan Lainnya		
4 Beban Pemasaran		
5 Beban Penelitian dan Pengembangan		
6 Beban Administrasi dan Umum		
a Beban Tenaga Kerja		
i. Gaji dan Upah		
ii. Honorarium		
iii. Lainnya		
b Beban Pendidikan dan Pelatihan		
c Beban Sewa		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
i. Gedung Kantor		
ii. Lainnya		
d Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris		
e Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
f Beban Premi Asuransi		
g Beban Pemeliharaan dan Perbaikan		
h Beban Barang dan Jasa		
i Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi		
j Kerugian terkait risiko operasional		
a. Kecurangan internal		
b. Kejahatan eksternal		
k Pajak-pajak		
7 Beban Lainnya		
a Kerugian Penjualan Valuta Asing		
b Kerugian Penjualan Surat Berharga		
c Kerugian dari penyertaan dengan equity method		
d Kerugian penjualan AYDA		
e Kerugian penurunan nilai AYDA		
f Lainnya		
Laba (Rugi) Operasional		
Pendapatan Non Operasional		
1 Keuntungan Penjualan		
a Aset Tetap dan Inventaris		
2 Pemulihan Penurunan Nilai		
a Aset Tetap dan Inventaris		
b Lainnya		
3 Bunga Antar Kantor		
4 Selisih Kurs		
5 Lainnya		
Beban Non Operasional		
1 Kerugian Penjualan/Kehilangan		
a Aset Tetap dan Inventaris		
2 Kerugian Penurunan Nilai		
a Aset Tetap dan Inventaris		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
b Lainnya		
3 Bunga Antar Kantor		
4 Selisih Kurs		
5 Lainnya		
Laba (Rugi) Non Operasional		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		
Taksiran Pajak Penghasilan		
Pendapatan Pajak Tangguhan		
Beban Pajak Tangguhan		
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan		
Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		
b. Lainnya		
c. Pajak Penghasilan terkait		
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual		
b. Lainnya		
c. Pajak Penghasilan terkait		
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak		
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

POS	Jumlah Posisi Tanggal Laporan	Jumlah Posisi Yang Sama Tahun Sebelumnya
Tagihan Komitmen		
a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik		
b. Tagihan Komitmen Lainnya		
Kewajiban Komitmen		
a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik		
b. Penerusan Kredit		
c. Kewajiban Komitmen Lainnya		
Tagihan Kontinjensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1) Bunga Kredit yang Diberikan		
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain		
3) Surat Berharga		
4) Lainnya		
b. Aset Produktif yang dihapusbuku		
1) Kredit yang Diberikan		
2) Penempatan pada Bank Lain		
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku		
4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku		
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit		
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya		
Kewajiban Kontinjensi		
Rekening Administratif Lainnya		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Pos	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	DSM Ekuitas	Laba/ Rugi Yang Belum Direalisasi
-----	---------------	----------------	-----------------	-------------	-----------------------------------

Form B.04.00
Laporan Perubahan Ekuitas

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditentukan	Jumlah
------------------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	--------

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Metode Langsung		
Penerimaan pendapatan bunga		
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi		
Penerimaan beban klaim asuransi		
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan		
Pendapatan operasional lainnya		
Pembayaran beban bunga		
Beban gaji dan tunjangan		
Beban umum dan administrasi		
Beban operasional lainnya		
Pendapatan non operasional lainnya		
Beban non operasional lainnya		
Pembayaran pajak penghasilan		
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban		
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain		
Kredit yang diberikan		
Agunan yang diambil alih		
Aset lain-lain		

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Penyesuaian lainnya atas aset operasional		
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera		
Tabungan		
Deposito		
Simpanan dari bank lain		
Pinjaman yang diterima		
Liabilitas imbalan kerja		
Liabilitas lain-lain		
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional		
Arus Kas neto dari aktivitas operasi		
Arus Kas dari aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris		
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud		
Pembelian/penjualan Surat Berharga		
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal		
Penyesuaian lainnya		
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi		
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Pos	Saldo 31 Desember T	Saldo 31 Desember T-1
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap		
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan		
Pembayaran dividen		
Penyesuaian lainnya		
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan		
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas		
Kas dan setara Kas awal periode		
Kas dan setara Kas akhir periode		

Form C.01.00

Laporan Akuntan Publik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wuni Artha

Utama Posisi Laporan : Desember 2025

**PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
LAPORAN KEUANGAN
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025**

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA

DAFTAR ISI

	Halaman
▪ Laporan Auditor Independen	
▪ Surat Pernyataan Direksi	
▪ Laporan Keuangan	
▪ Laporan Posisi Keuangan	1-2
▪ Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain	3
▪ Laporan Perubahan Ekuitas	4
▪ Laporan Arus Kas	5
▪ Catatan Atas Laporan Keuangan	
▪ Gambaran Umum	6 - 8
▪ Pernyataan Kepatuhan & Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	9 - 27
▪ Informasi yang Mendukung Pos-Pos Laporan Keuangan	28 - 44
▪ Lampiran	

SURAT PERNYATAAN DIREKSI



PT. BPR WUNI ARTHA UTAMA

Jl. Raya Klaten - Solo Km. 08, Meger, Ceper, Klaten
Telp./Fax : (0272) 331032, E-mail : wuniarthautama@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 PT BPR WUNI ARTHA UTAMA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Pebruono, S.E., M.M.
Alamat Kantor : Jl. Raya Klaten - Solo Km.08, Meger, Ceper, Klaten
Jabatan : Direktur Utama

Untuk dan atas nama PT BPR Wuni Artha Utama, kami menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR Wuni Artha Utama
2. Laporan keuangan PT BPR Wuni Artha Utama tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) serta Panduan Akuntansi Perbankan Bank Perekonomian Rakyat (PAP BPR).
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPR Wuni Artha Utama telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT BPR Wuni Artha Utama tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT BPR Wuni Artha Utama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi PT BPR Wuni Artha Utama.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Klaten, 14 Februari 2026

43002ANX238535461
Pebruono, S.E., M.M.

Direktur Utama

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 00024/2.1358/AU.8/07/0906-1/1/II/2026

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

PT. BPR Wuni Artha Utama

Jl. Raya Klaten - Solo Km.08, Meger, Ceper, Klaten

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan PT. BPR Wuni Artha Utama ("Perusahaan"), yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Posisi Keuangan PT. BPR Wuni Artha Utama terlampir untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Atas Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada Penjelasan Pos-Pos Laporan keuangan 4.25 dalam laporan keuangan, yang menjelaskan bahwa laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 telah disajikan kembali untuk menyesuaikan saldo-saldo agar sesuai dengan SAK EP. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal-Hal Lain

Laporan Keuangan PT. BPR Wuni Artha Utama per 31 Desember 2024, diaudit oleh akuntan publik Kristianto Purwokowidodo dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, sesuai laporannya No: 00016/2.1376/AU.2/07/1367-1/1/III/2025 tertanggal 05 Maret 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan

Kantor : Jl. Tegalsari Raya No: 14, Jomblangan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198

Telp/Fax: (0274) 2841679, Email: kap.iy.pst@gmail.com; kap.iy.ind@gmail.com; kap.iy.yud@gmail.com



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- *Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.*
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Indarto dan Yudhika
Managing Partner

Indarto Waluyo, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI.NRAP.
AP.0906

Yogyakarta, 14 Februari 2026: FR



t

LAPORAN KEUANGAN

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Pada 31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025 <i>(SAK EP)</i>	2024 <i>(Restatement SAK EP)</i>	2024 <i>(SAK ETAP)</i>
ASET				
Kas	3.6.a.1, 4.1	174.054.800	208.641.350	208.641.350
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima		-	-	238.770.412
Penempatan pada Bank Lain	3.6.a.4, 4.2	6.445.537.055	7.005.925.566	7.005.925.566
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PPBL	3.6.a.4, 4.2	-	-	-
Total		6.619.591.855	7.214.566.916	7.453.337.328
Kredit Yang Diberikan (KYD)	3.6.a.5, 4.3	22.267.980.649	21.934.601.393	22.054.190.994
Provisi & Administrasi		-	-	(87.833.557)
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan		-	-	(31.756.044)
PPKA Kredit Yang Diberikan		-	-	(134.549.914)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai KYD	3.6.a.5, 4.3	(121.070.614)	(98.144.973)	-
Jumlah		22.146.910.035	21.836.456.420	21.800.051.479
Agunan Yang Diambil Alih	3.6.a.7,4.4	-	160.000.000	160.000.000
Aset Tetap dan Inventaris	3.6.a.8, 4.5	1.011.465.800	916.915.800	916.915.800
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap & Inventaris	3.6.a.8, 4.5	(652.146.141)	(773.343.787)	(773.343.787)
Jumlah		359.319.659	143.572.013	143.572.013
Aset Tidak Berwujud	3.6.a.10, 4.6	56.810.000	56.810.000	56.810.000
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.6.a.10, 4.6	(48.364.179)	(38.039.175)	(38.039.175)
Jumlah		8.445.821	18.770.825	18.770.825
Aset lain-lain	3.6.a.11, 4.7	450.938.505	265.615.481	26.845.069
JUMLAH ASET		29.585.205.875	29.638.981.655	29.602.576.714

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Pada 31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024	2024
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Segera	3.6.b, 4.8	22.415.255	21.274.714	21.274.714
Utang Bunga		-	-	26.303.978
Utang Pajak		-	-	-
Simpanan	3.6.b.1, 4.9			
Tabungan		6.235.947.139	6.183.004.057	6.183.004.057
Deposito Berjangka		9.250.350.000	9.803.800.000	9.803.800.000
Simpanan Dari Bank Lain	3.6.b.2, 4.10	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Liabilitas Imbalan Kerja	3.6.b.7, 4.11	81.468.000	96.597.855	96.597.855
Liabilitas Lain-lain	3.6.b.8, 4.12	279.663.930	240.801.067	214.497.089
Jumlah Liabilitas		17.869.844.324	18.345.477.693	18.345.477.693
EKUITAS				
Modal				
Modal Dasar	3.6.c, 4.13	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Modal Belum Disetor		(700.000.000)	(700.000.000)	(700.000.000)
Modal Disetor		9.300.000.000	9.300.000.000	9.300.000.000
Saldo Laba				
Saldo Laba	3.6.c, 4.13			
- Cadangan Umum		1.728.167.907	1.670.935.129	1.670.935.129
- Laba Yang Belum Ditentukan Tujuannya:				
- Laba (Rugi) Tahun Lalu		236.719.663	36.404.941	-
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan		450.473.981	286.163.892	286.163.892
Jumlah Saldo Laba		2.415.361.551	1.993.503.962	1.957.099.021
Jumlah Ekuitas		11.715.361.551	11.293.503.962	11.257.099.021
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		29.585.205.875	29.638.981.655	29.602.576.714

Klaten, 14 Februari 2026

Atas nama dan mewakili direksi,

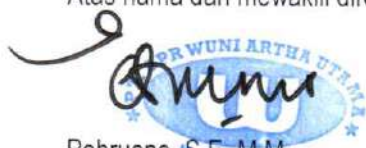
Pebruono, S.E., M.M.
 Direktur Utama

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024	2024
		(SAK EP)	(Restatement SAK EP)	(SAK ETAP)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan Bunga	3.7.a.1, 4.14			
Bunga Kontraktual		2.967.614.339	2.885.726.031	2.885.726.031
Provisi Dan Jasa Administrasi		89.568.217	111.650.782	111.650.782
Jumlah Pendapatan Bunga		3.057.182.556	2.997.376.813	2.997.376.813
Beban Bunga	3.7.a.2, 4.17	(1.123.501.379)	(1.131.399.111)	(1.131.399.111)
Pendapatan Operasional Lainnya	3.7.a.1, 4.16	412.280.565	588.070.976	588.070.976
Jumlah Pendapatan Operasional		2.345.961.742	2.454.048.678	2.454.048.678
Beban Operasional				
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3.7.a.2, 4.18			
Penempatan Pada Bank Lain		662.849	-	-
Kredit Yang Diberikan		68.664.271	83.041.128	83.041.128
Beban Pemasaran	3.7.a.2, 4.19	19.046.500	33.274.000	33.274.000
Beban Administrasi dan Umum	3.7.a.2, 4.20	1.801.352.336	1.977.729.509	1.977.729.509
Beban Operasional Lainnya	3.7.a.2, 4.21	79.010.528	44.544.848	44.544.848
Jumlah Beban Operasional		1.968.736.484	2.138.589.485	2.138.589.485
Laba (Rugi) Operasional		377.225.258	315.459.193	315.459.193
Pendapatan (Beban) Non Operasional				
Pendapatan Non Operasional	3.7.b.1, 4.22	133.293.295	11.733.271	11.733.271
Beban Non Operasional	3.7.b.2, 4.22	(4.368.012)	(5.660.000)	(5.660.000)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		128.925.283	6.073.271	6.073.271
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK		506.150.541	321.532.464	321.532.464
Taksiran Pajak Penghasilan	3.7.c.1, 4.23	55.676.560	35.368.572	35.368.572
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK		450.473.981	286.163.892	286.163.892
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	-

Klaten, 14 Februari 2026
 Atas nama dan mewakili direksi,


Pebruono, S.E., M.M.
 Direktur Utama

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	MODAL DISETOR	SALDO LABA		JUMLAH
		CADANGAN UMUM	SALDO LABA BELUM DITENTUKAN TUJUANNYA	
Saldo per 31 Desember 2023 Audited	8.000.000.000	1.468.129.462	1.571.709.872	11.039.839.334
Modal Disetor	1.300.000.000			1.300.000.000
Cadangan Umum		202.805.668	(202.805.668)	(1)
Jasa Pengurus			(40.561.134)	(40.561.134)
Jasa Karyawan			(40.561.134)	(40.561.134)
Dana Sosial			(10.140.283)	(10.140.283)
Dana CSR			(10.140.283)	(10.140.283)
Dividen			(1.267.501.370)	(1.267.501.370)
Laba (rugi) Tahun Berjalan			286.163.892	286.163.892
Saldo per 31 Desember 2024 Audited	9.300.000.000	1.670.935.129	286.163.892	11.257.099.021
Cadangan Umum		57.232.777	(57.232.777)	-
Jasa Pengurus			(11.446.556)	(11.446.556)
Jasa Karyawan			(11.446.556)	(11.446.556)
Dana Sosial			(2.861.639)	(2.861.639)
Dana CSR			(2.861.639)	(2.861.639)
Penyesuaian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			36.404.941	36.404.941
Penyesuaian			(3)	(3)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan			450.473.981	450.473.981
Saldo per 31 Desember 2025 Audited	9.300.000.000	1.728.167.906	687.193.644	11.715.361.550

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
LAPORAN ARUS KAS
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Penerimaan pendapatan bunga	2.967.614.339	2.885.726.031
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	89.568.217	111.650.782
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	300.000	1.100.000
Pendapatan operasional lainnya	411.980.565	586.970.972
Pembayaran beban bunga	(1.123.501.379)	(1.131.399.111)
Beban gaji dan tunjangan	(1.442.972.427)	(1.600.016.804)
Beban umum dan administrasi	(446.753.529)	(494.027.833)
Beban operasional lainnya	(79.010.528)	(44.544.848)
Pendapatan non operasional lainnya	133.293.295	11.733.272
Beban non operasional lainnya	(4.368.012)	(5.660.000)
Pembayaran pajak penghasilan	(55.676.560)	(35.368.572)
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	(449.631.911)	(100.923.647)
PERUBAHAN ASET DAN KEWAJIBAN OPERASI		
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima		
Penempatan Pada Bank Lain	560.388.511	928.215.075
Kredit Yang Diberikan	(294.263.176)	2.547.026.452
Agunan Yang Diambil Alih	160.000.000	(160.000.000)
Aset Lain-lain	(185.323.026)	359.642.478
Liabilitas Segera	1.140.541	(19.587.438)
Simpanan		
Tabungan	52.943.082	(922.155.673)
Deposito Berjangka	(553.450.000)	(725.500.000)
Simpanan Dari Bank Lain	-	(300.000.000)
Pinjaman Diterima	-	(1.472.581.410)
Kewajiban Imbalan Kerja	(15.129.855)	(228.088.556)
Kewajiban Lain - Lain	38.862.863	(47.216.016)
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI	(233.988.990)	144.995.154
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian/ penjualan Aset Tetap dan inventaris	(94.550.000)	50.309.850
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI	(94.550.000)	50.309.850
ARUS KAS DARI PENDANAAN		
Penyesuaian Lainnya	293.952.440	(68.904.204)
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS PENDANAAN	293.952.440	(68.904.204)
KENAIKAN/(PENURUNAN) ARUS KAS	(34.586.550)	126.400.800
KAS AWAL PERIODE	208.641.350	82.240.550
KAS AKHIR PERIODE	174.054.800	208.641.350

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. PENGUNGKAPAN LAINNYA

a. Pendirian Perusahaan

PT. BPR Wuni Artha Utama didirikan pada tanggal 09 Februari 2006 berdasarkan akta pendirian No. 05 yang dibuat oleh Notaris Klaten, saudari Primastuti Rahayuningsih, Sarjana Hukum dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-07659HT.01.01 Tahun 2006, tanggal 16 Juni 2006 yang ditetapkan di Klaten.

b. Tempat dan Kedudukan

PT BPR Wuni Artha Utama beralamat di Jl. Raya Klaten - Solo Km.08, Meger, Ceper, Klaten

Telp./Fax : (0272) 331032

Email : wuniarthautama@yahoo.co.id

c. Jangka Waktu Pendirian

PT BPR Wuni Artha Utama didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

d. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 19 Tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar PT BPR Wuni Artha Utama tertanggal 31 Januari 2022, yang dibuat dihadapan Septi Hariyanti, SE., Mkn., notaris di Kabupaten Klaten serta telah disahkan berdasarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0008987.AH.01.02.Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPR Wuni Artha Utama tertanggal 07 Februari 2022 yang berisi merubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Bank Perkreditan Rakyat

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

e. Perizinan Usaha

Dalam melaksanakan operasi usahanya, PT BPR Wuni Artha Utama memiliki perijinan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-07659HT.01.01 Tahun 2006 tertanggal 15 Maret 2006 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. BPR Wuni Artha Utama.
2. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 8/73/KEP.GBI/2006 Tentang Pemberian Izin Usaha PT BPR Wuni Artha Utama tertanggal 06 Oktober 2006
3. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan No: 02.513.901.5-525.000 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan
4. Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri Nomor : 503.1/162/2013 yang ditetapkan pada

tanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Klaten.

5. Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1901240007743 tanggal 19 Januari 2024 dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 19012410213310009 tanggal 16 Januari 2024
6. Surat Keterangan Domisili Nomor: 145/92/VI/2009 tertanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Kecamatan Ceper Desa Meger.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. PENGUNGKAPAN LAINNYA - lanjutan

f. Modal

Berdasarkan akta pendirian No. 05 yang dibuat oleh Notaris Klaten, saudara Primastuti Rahayuningsih, Sarjana Hukum, dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-07659.HT.01.01.Tahun 2006, tanggal 15 Maret 2006 yang ditetapkan di Klaten, dinyatakan bahwa modal dasar PT. BPR Wuni Artha Utama berjumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham. Masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% (lima puluh persen) atau sejumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Nominal	Total	%
Tuan Drs. Sunardi	400	1.000.000	400.000.000	40%
Tuan Drs. Harjono	400	1.000.000	400.000.000	40%
Nyonya Fitri Rahayu	150	1.000.000	150.000.000	15%
Tuan Drs. Martono	50	1.000.000	50.000.000	5%
Jumlah	1.000		1.000.000.000	100%

Seiring dengan perkembangan perusahaan, telah terjadi perubahan komposisi permodalan, perubahan terakhir dicatatkan pada Notaris TH Retno Triwiyati Sapar Wulan, SH., M. Kn, dengan Akta Nomor : 24 Tanggal 29 September 2021. Dalam Akta tersebut dinyatakan bahwa terjadi penambahan modal disetor sehingga menjadi Rp 7.525.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terbagi atas 7.525 (tujuh ribu lima ratus dua puluh lima) lembar saham @ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan susunan kepemilikan sebagai berikut :

Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Nominal	Total	%
Tuan Drs. Sunardi	3.450	1.000.000	3.450.000.000	46%
Nyonya Fitri Rahayu	3.125	1.000.000	3.125.000.000	42%
Tuan Drs. Hardjono	950	1.000.000	950.000.000	13%
Jumlah	7.525		7.525.000.000	100%

Pada tahun 2022 terdapat penambahan modal disetor PT BPR Wuni Artha Utama. Hal ini berdasarkan Akta No. 09 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Wuni Artha Utama tertanggal 14 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Septi Hariyanti, SE., Mkn., notaris di Kabupaten Klaten. Serta telah disahkan berdasarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0169271 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BPR Wuni Artha Utama tertanggal 15 Maret 2022 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-273/KO.0301/2022 Hal: Penambahan Modal Disetor PT BPR Wuni Artha Utama tertanggal 1 April 2022.

Dalam hal ini berisi salah satunya memutuskan dan menyetujui penambahan modal disetor PT BPR Wuni Artha dengan penambahan sejumlah 475 (empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang semula berjumlah 7.525 (tujuh ribu lima ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp 7.525.000.000,- (tujuh milyar lima dua puluh lima juta rupiah) sehingga bertambah menjadi 8.000 (delapan ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), sehingga kepemilikan saham PT BPR Wuni Artha per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. PENGUNGKAPAN LAINNYA - lanjutan

f. Modal - lanjutan

Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Nominal	Total	%
Tuan Drs. Sunardi	3.700	1.000.000	3.700.000.000	46%
Nyonya Fitri Rahayu, SE	3.350	1.000.000	3.350.000.000	42%
Tuan Drs. Hardjono	950	1.000.000	950.000.000	12%
Jumlah	8.000		8.000.000.000	100%

Pada tahun 2023 struktur kepemilikan saham belum mengalami perubahan. Hal ini tercatat dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018570. AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023. Kepemilikan tersebut juga telah disahkan melalui akta notaris yang terbaru di hadapan notaris TH. Retno Triwiyati Sapar Wulan, SH., M.Kn, notaris di Kabupaten Klaten dengan akta nomor 09 tertanggal 13 Maret 2023 masih dengan kepemilikan yang sama.

Berdasarkan akta notaris no 28 tertanggal 28 Februari 2024 dihadapan notaris TH Retno Triwiyati Sapar Wulan, SH, PT BPR Wuni Artha Utama mengalami perubahan kepemilikan modal yang telah disetor sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) atau bertambah menjadi 9.300 (sembilan ribu tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp 9.300.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah). Kepemilikan tersebut juga telah tercatat dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015852.AH.01.02 Tahun 2024. Perihal: Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BPR Wuni Artha Utama tertanggal 12 Maret 2024 Adapun kepemilikan saham pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Nama Pemilik	Jumlah Lembar Saham	Nominal	Total	%
Tuan Drs. Sunardi	4.325	1.000.000	4.325.000.000	47%
Nyonya Fitri Rahayu, SE	3.925	1.000.000	3.925.000.000	42%
Tuan Drs. Hardjono	1.050	1.000.000	1.050.000.000	11%
Jumlah	9.300		9.300.000.000	100%

g. Susunan Pengurus

Susunan pengurus PT BPR Wuni Artha Utama tahun 2025 berdasarkan Akta No. 01 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Wuni Artha Utama tertanggal 01 Agustus 2025 dihadapan notaris TH. Retno Triwiyati Sapar Wulan, S.H., M.Kn notaris di Klaten . Adapun susunan pengurus PT BPR Wuni Artha Utama per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Susunan Pengurus :

- Komisaris Utama : Drs. Sunardi
- Komisaris : Fitri Rahayu, SE
- Direktur Utama : Pebruono, S.E, M.M
- Direktur YMF Kepatuhan : -

Sampai tanggal 31 Desember 2025, PT BPR Wuni Artha Utama memiliki karyawan berjumlah 20 orang sudah termasuk 1 orang Direksi.

h. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan

Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 14 Februari 2026.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen PT BPR Wuni Artha Utama menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2025 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding 2024 *Audited* disajikan berdasarkan:

- a. SAK EP (Entitas Privat);
Laporan keuangan BPR disusun sesuai dengan SAK EP. Sedangkan PA BPR merupakan petunjuk teknis bagi BPR dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK yang efektif saat ini. PA BPR bukan merupakan pengganti SAK EP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan BPR. PA BPR tersebut sesuai dengan SE OJK No. 21/SEOJK.03/2024 Tentang Panduan Akuntansi Perbankan BPR.
- b. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan BPR; dan
- d. Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum dan standar akuntansi keuangan selain SAK EP.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

3.2 Bahasa laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dalam Bahasa Indonesia.

3.3 Tanggung jawab atas laporan keuangan

Direksi BPR bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

3.4 Mata uang pelaporan

- a. Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Apabila transaksi BPR menggunakan mata uang selain dari rupiah, maka laporan tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Dalam hal kurs mata uang asing tidak tersedia di Bank Indonesia, BPR menggunakan kurs sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- b. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Transaksi dalam mata uang asing harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

3.5 Prinsip Penyajian Laporan Keuangan

BPR menyusun laporan keuangan menggunakan dasar akuntansi akrual, kecuali untuk informasi arus kas. Dalam dasar akrual, BPR mengakui aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan atau beban ketika definisi dan kriteria pengakuan terpenuhi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.36).

3.6. Laporan Posisi Keuangan

a. Aset

Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan sumber manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan diterima BPR. (Hal ini mengacu pada SAK EP lampiran B). Adapun pos-pos yang merupakan aset keuangan seperti surat berharga, penempatan pada bank lain, kredit, dan penyertaan modal disertai dengan pos pengurang berupa CKPN.

BPR menghitung Penyisihan Penghapusan Kualitas Aset (PPKA) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai kualitas aset BPR. Apabila nilai PPKA lebih besar dari CKPN yang dibentuk BPR sesuai dengan SAK EP, maka selisih nilai PPKA dengan CKPN menjadi faktor pengurang dalam perhitungan modal inti BPR.

BPR mengakui aset dalam laporan posisi keuangan ketika kemungkinan besar manfaat ekonomik masa depan akan mengalir ke BPR dan nilai aset dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.37).

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

3.6. Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

a. Aset (Lanjutan)

1). Kas

Kas adalah mata uang kertas atau logam dalam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin anjungan tunai mandiri (ATM), dan kas dalam perjalanan. Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coins/notes*), dan mata uang emas.

2). Kas dalam valuta asing

Kas dalam valuta asing adalah uang kertas asing (*banknotes*) dan *traveller's cheque* yang masih berlaku yang dimiliki BPR dalam kegiatan penukaran sebagai pedagang valuta asing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. SAK EP Bab 30 tentang Penjabaran Valuta Asing.

BPR dapat memiliki kas dalam valuta asing hanya dalam rangka melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Mata uang asing diakui sebesar kurs transaksi (*spot rate*) yang berlaku pada tanggal perolehan/transaksi.

(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 30.7). Pada setiap tanggal pelaporan BPR menjabarkan kas dalam valas ke rupiah dengan kurs penutup. Kurs penutup yang dirujuk adalah kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pelaporan dengan menggunakan kurs tengah yaitu kurs transaksi jual ditambah kurs transaksi beli mata uang asing Bank Indonesia dibagi dua. Kas dalam valuta asing disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar nilai nominal.

3). Surat Berharga

Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah Pusat Republik Indonesia, dan/atau Pemerintah Daerah.

Surat berharga diukur pada biaya perolehan ditambah/dikurangi biaya transaksi. Contoh biaya transaksi yaitu *brokerage fee*. Pendapatan bunga diukur dengan suku bunga efektif. Pengukuran selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Surat berharga disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

4). Penempatan Pada Bank lain

Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain baik konvensional maupun syariah dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*. Cakupan penempatan pada bank lain adalah penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan penempatan dana lainnya yang sejenis. Nilai tercatat penempatan pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat liabilitas pada bank lain, meskipun terhadap bank yang sama.

- Giro merupakan simpanan BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit), sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.

- Tabungan merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

3.6. Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

a. Aset (Lanjutan)

4). Penempatan Pada Bank Lain (Lanjutan)

- Deposito merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara BPR dan bank yang bersangkutan. Deposito terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan deposit on call. Deposit on call merupakan deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.
- Sertifikat deposito merupakan simpanan BPR pada bank umum dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (atas unjuk). Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor.
- Penempatan pada bank syariah merupakan penempatan dana BPR pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum dan BPR syariah dengan menggunakan akad syariah. Perlakuan akuntansi merujuk kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Giro, deposito, dan tabungan pada bank lain pada umumnya dicatat sebesar biaya perolehan, kecuali untuk produk sertifikat deposito dengan diskonto. Pengukuran selanjutnya, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Nilai tercatat penempatan pada bank lain adalah nilai penempatan pada bank lain neto pada tanggal pelaporan setelah dikurangi CKPN. CKPN penempatan pada bank lain disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari penempatan tersebut.

5). Kredit yang Diberikan

Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk pengalihan piutang.

Kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan ditambah/dikurangi biaya transaksi termasuk provisi. Pendapatan bunga diukur dengan suku bunga efektif. Pengukuran selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

Pada saat penandatanganan perjanjian Kredit dengan debitur, BPR mengakui sebagai "kewajiban komitmen fasilitas Kredit yang diberikan kepada debitur" sebesar Plafon Kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan Kredit yang disepakati BPR dengan debitur, kecuali untuk penerusan Kredit. Jumlah kewajiban komitmen fasilitas Kredit tersebut dapat berkurang atau bertambah selama jangka waktu Kredit sesuai jenis Kreditnya,

Kredit disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Kredit sindikasi disajikan berdasarkan porsi Kredit yang risikonya ditanggung BPR, termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi Kredit dimaksud. Kredit kelolaan disajikan pada pos "Kredit yang Diberikan" berdasarkan porsi Kredit yang risikonya ditanggung BPR termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi Kredit dimaksud.

Pendapatan bunga dari Kredit (yang diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang pada saat pengakuan awal Kredit atau pada saat penyesuaian suku bunga Kredit) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya, disajikan sebagai tagihan bunga Kredit atau pendapatan bunga Kredit yang akan diterima.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Selisih kurang antara perubahan estimasi arus kas atas Restrukturisasi Kredit dibandingkan dengan nilai tercatat diperhitungkan sebagai kerugian kredit.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

3.6. Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

a. Aset (Lanjutan)

5). Kredit yang Diberikan (Lanjutan)

Kredit restrukturisasi disajikan menjadi bagian dari Kredit.

Penghapusbukuan Kredit (hapus buku) adalah tindakan administratif BPR untuk memindahkan nilai yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan tanpa mengurangi hak tagih BPR kepada debitur secara kontrak. Pada saat kredit dihapus buku, BPR telah membentuk CKPN sebesar 100%.

Penghapusbukuan dilakukan secara keseluruhan terhadap nilai tercatat Kredit dengan menjurnal balik CKPN – Kredit yang diberikan. Kredit yang dihapus buku disajikan dalam Rekening Administratif. Setoran yang diterima dari debitur atas kredit yang telah dihapus buku diakui sebagai Pendapatan Hapus Buku (Pendapatan Operasional Lainnya).

6). Penyertaan Modal

Penyertaan Modal adalah penanaman dana BPR dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan SAK EP Bab 11 tentang Instrumen Keuangan Dasar dan SAK EP Bab 14 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi.

BPR mencatat seluruh investasi pada entitas asosiasi menggunakan salah satu metode yaitu metode biaya atau metode ekuitas.

Penghasilan dividen dari investasi pada entitas asosiasi diakui pada saat hak grup untuk menerima pembayaran telah ditetapkan. Penghasilan dividen termasuk dalam penghasilan lain.

BPR mengklasifikasikan investasi pada entitas asosiasi sebagai aset tidak lancar. (Hal ini mengacu SAK EP paragraf 14.11)

7). Agunan Yang Diambil Alih

Agunan yang Diambil Alih selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang diperoleh BPR baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dengan ketentuan agunan yang dibeli untuk dicairkan secepatnya. (sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR)

Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan. Nilai Wajar adalah suatu jumlah dimana aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan, antara pihak yang paham dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Nilai Tercatat adalah nilai yang disajikan dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi cadangan rugi penurunan nilai.

AYDA yang dicatat dalam laporan posisi keuangan hanya yang berasal dari penyelesaian kredit melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan. BPR memperhitungkan AYDA yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sesuai dengan POJK mengenai kualitas aset BPR.

Pada saat pengakuan awal, AYDA dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual yaitu maksimum sebesar kewajiban debitur. BPR tidak boleh mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset.

Setelah pengakuan awal, AYDA dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Apabila AYDA mengalami penurunan nilai, maka BPR mengakui rugi penurunan nilai tersebut.

Apabila AYDA mengalami pemulihan penurunan nilai, maka BPR mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

3.6. Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

a. Aset (Lanjutan)

7). Agunan Yang Diambil Alih (Lanjutan)

AYDA tidak dilakukan depresiasi.

Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat AYDA dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian operasional.

Hasil penjualan agunan yang dikuasai diakui sebagai pengurang tagihan yang terkait dengan kredit.

Biaya transaksi dalam proses pengurusan AYDA dapat dikapitalisasi sepanjang nilai AYDA lebih besar dibandingkan nilai tercatat kredit setelah ditambah kapitalisasi biaya transaksi.

AYDA disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebesar mana yang lebih rendah, antara: nilai tercatat kredit; atau nilai wajar setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual.

8). Aset Tetap

Aset tetap dan inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.2). Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 17 tentang Aset Tetap, SAK EP Bab 20 tentang Sewa dan SAK EP Bab 27 tentang Penurunan Nilai Aset.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sesuai PMK No. 72 Tahun 2023.

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tetap tersedia untuk digunakan dan penyusutannya dihentikan ketika aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya.

9). Properti Terbengkalai

Properti Terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki BPR namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR yang berkaitan operasional BPR. (sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR). Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 16 tentang Properti Investasi.

10). Aset Tak Berwujud

Aset Takberwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 18.2).

Bab ini hanya diterapkan untuk akuntansi seluruh aset takberwujud selain goodwill.

Pengakuan awal aset takberwujud diakui sebesar biaya perolehan.

BPR mengukur aset takberwujud pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset takberwujud diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya dan diakui sebagai beban

Penurunan nilai aset takberwujud diakui sebagai kerugian periode terjadinya.

11). Aset lainnya

Aset Lainnya adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Komponen aset lainnya, antara lain:

Pajak dibayar dimuka, biaya dibayar dimuka, Mata uang kertas dan logam yang ditarik, Piutang dari perusahaan asuransi, Aset Pajak Tangguhan, Aset Keuangan Lainnya, Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima, Lainnya. Aset lainnya disajikan secara gabungan, kecuali komponennya memiliki nilai yang material, maka komponen tersebut disajikan tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 11 tentang Instrumen Keuangan Dasar.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

3.6. Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

a. Aset (Lanjutan)

12). Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Lanjutan)

CKPN adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.

Pada setiap akhir periode pelaporan, BPR menilai apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR langsung mengakui kerugian penurunan nilai dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.21).

Alur pembentukan CKPN sebagai berikut:

Langkah Pertama: Penilaian Pemenuhan Kriteria Aset Baik

- BPR melakukan penilaian apakah aset keuangan memenuhi kriteria aset baik. Kriteria aset baik sebagai berikut:

aset keuangan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia; aset keuangan dijamin oleh LPS; dan/atau aset keuangan tidak memiliki tunggakan lebih dari 7 (tujuh) hari dan tidak pernah dilakukan restrukturisasi. Dalam hal BPR melakukan perpanjangan kredit tanpa melihat kemampuan membayar debitur, hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa kredit dimaksud tidak tergolong aset baik.

- Apabila aset keuangan memenuhi kriteria aset baik, BPR dapat tidak membentuk CKPN atas aset keuangan tersebut; aset keuangan tidak memenuhi kriteria aset baik, BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan (Langkah Kedua).

Langkah Kedua: Penilaian Signifikansi

- BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik. Apabila aset keuangan signifikan, BPR melakukan penilaian terhadap aset keuangan tersebut secara individual (langkah ketiga); aset keuangan tidak signifikan, BPR membentuk CKPN secara kolektif.

Langkah Ketiga: Penilaian Individu Bukti Objektif Penurunan Nilai

- BPR melakukan penilaian secara individual terhadap aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik dan signifikan. Penilaian dilakukan dengan menganalisis apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai atas aset keuangan. Apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN individual; tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN kolektif.

Periode evaluasi penurunan nilai, bahwa setiap akhir bulan atau paling lambat setiap akhir triwulan, BPR mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa kredit atau kelompok kredit mengalami penurunan nilai. Dalam hal BPR melakukan evaluasi setiap akhir triwulan, namun terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai sebelum tanggal evaluasi berikutnya, maka BPR mengestimasi kembali arus kas masa datang dan CKPN untuk kredit tersebut.

Dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut, bahwa BPR melakukan konsolidasi dengan kepemilikan yang sama; BPR melakukan akuisisi dan/atau penggabungan usaha; dan/atau BPR mengganti aplikasi inti perbankan atau sistem pencatatan transaksi, yang menyebabkan BPR belum dapat menyediakan data untuk perhitungan CKPN kolektif maka pembentukan CKPN kolektif dapat menggunakan *peer group* data sampai dengan BPR memiliki data historis untuk perhitungan CKPN kolektif minimal 2 (dua) tahun periode bisnis normal.

Sesuai dengan Pedoman Penerapan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) No : 155/SK-DIR/WAU/VX/2025 ketentuan CKPN yang berlaku untuk BPR menggunakan dasar ketentuan pada PSAK 55 yaitu dengan menggunakan metode *incurred loss* artinya dan bersifat *backward looking*. CKPN menggunakan prinsip :

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

3.6. Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

a. Aset (Lanjutan)

12). Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Lanjutan)

1. *Principle based* yang berarti Bank mengembangkan model berdasarkan hasil evaluasi penurunan nilai. Oleh karena itu, CKPN menggunakan pendekatan perhitungan secara *individual assessment* dan *collective assessment*.
2. *Accounting Purposed* yang berarti kriteria penilaian didasarkan pada bukti obyektif penurunan nilai, tingkat signifikansi, professional judgement serta *risk management*. Kriteria penilaian berfokus pada kebutuhan kecukupan pencadangan berdasarkan *credit risk*.

Metode Perhitungan CKPN:

a.) CKPN Individu

Kualitas kredit memiliki pengaruh yang signifikan secara individu yang ditetapkan bahwa kredit termasuk dalam kredit dengan plafon 25 terbesar dengan perhitungan HT (Hak Tanggungan). Setelah ditentukan memiliki kriteria signifikan secara individu, maka evaluasi penurunan nilai secara individu juga harus memiliki bukti obyektif penurunan nilai. Bukti obyektif penurunan nilai ini dapat terlihat dari riwayat pembayaran kredit yang tidak sesuai dengan jadwal atau tagihan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Bank menetapkan bahwa kredit termasuk memiliki penurunan nilai apabila memiliki tunggakan pokok atau bunga <7 hari.

Kredit yang telah dilakukan sortasi dengan klasifikasi termasuk aset signifikan dan terdapat bukti obyektif penurunan nilai akan dilakukan perhitungan CKPN secara individual. Dalam perhitungan CKPN secara individu, metode yang digunakan adalah Discounted Cash Flow. Metode ini menggunakan teknik dengan asumsi bahwa nasabah sanggup melakukan pembayaran kredit dari arus kas keuangan atau hasil usaha.

b.) CKPN Kolektif

Kriteria evaluasi penurunan secara kolektif yang pertama adalah tidak signifikan secara individual. Setelah itu, kredit yang termasuk ke dalam evaluasi secara kolektif adalah memiliki karakteristik yang sama. Kesamaan karakteristik ini akan menggambarkan tingkat risiko yang sama juga. Dalam hal penentuan karakteristik yang sama Bank menetapkan kriteria berdasarkan jenis penggunaan kredit. Kriteria yang selanjutnya menentukan untuk dilakukan evaluasi secara kolektif adalah secara individual tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai yang signifikan artinya tidak termasuk dalam kategori 25 besar plafon.

Dalam perhitungan CKPN Kolektif, Bank harus melakukan langkah perhitungan sebagai berikut :

$$\text{CKPN Kolektif} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD}$$

i.) PD (Probability of Default)

Kriteria : jenis penggunaan

Metode : Migration analysis

ii.) LGD (Loss Given Default)

Metode : Kombinasi (Collateral Shortfall dan Expected Recoveries)

Sesuai pedoman SAK EP, nilai CKPN akan dibandingkan dengan nilai PPKA yang dibentuk oleh Bank yaitu apabila nilai PPKA lebih besar dari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang dibentuk bank sesuai dengan SAK EP, maka selisih nilai PPKA dengan CKPN menjadi faktor pengurang dalam perhitungan modal inti bank.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

3.6. Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

b. Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya BPR. Penyelesaian kewajiban kini biasanya melibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.20, paragraf 2.21, dan lampiran B).

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan ketika:

- BPR memiliki kewajiban pada akhir periode pelaporan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu;
- Kemungkinan besar BPR akan menyelesaikan liabilitas tersebut dengan menyerahkan asetnya; dan
- Nilai liabilitas dapat diukur secara andal.

1). Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Simpanan merupakan liabilitas keuangan. Pengakuan awal sebesar nilai sekarang kas yang disampaikan ke BPR dikurangi biaya transaksi. Pengukuran selanjutnya menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Jika tidak terdapat biaya transaksi, nilai pada umumnya sama dengan jumlah kas yang akan dibayarkan dan tidak didiskontokan.

Bentuk-bentuk simpanan berupa:

- Tabungan adalah simpanan milik pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung. Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima. Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan. Dalam hal terdapat amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada tabungan maka diakui sebagai beban bunga. Perhitungan beban bunga menggunakan suku bunga efektif. Tabungan disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan.
- Deposito adalah simpanan milik pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan BPR. Deposito yang dimaksud adalah deposito yang berjangka waktu. Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Setoran deposito diakui pada saat uang diterima. Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito. Amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada deposito diakui sebagai beban bunga. Deposito disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar estimasi/jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban. Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.
- Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

2). Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah liabilitas BPR berupa tabungan dan deposito dari bank lain di Indonesia. Simpanan dari bank lain berupa tabungan dan deposito. Simpanan dari bank lain tidak termasuk pinjaman dari bank lain yang akan dicatat pada pos pinjaman yang diterima.

Tabungan dari bank lain, bahwa transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh bank lain. Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima. Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan. Tabungan disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar kewajiban BPR kepada bank lain pemilik tabungan.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

3.6. Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

b. Liabilitas (lanjutan)

2). Simpanan Dari Bank Lain (lanjutan)

Deposito dari bank lain, bahwa transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Setoran deposito diakui pada saat uang diterima. Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito. Deposito dari bank lain disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar estimasi/jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban. Kewajiban bunga deposito yang belum atau yang sudah jatuh tempo disajikan dalam pos Utang Bunga.

3). Liabilitas Segera

Liabilitas segera adalah liabilitas BPR yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Liabilitas segera berasal dari aktivitas pendukung kegiatan operasional BPR baik terhadap masyarakat maupun terhadap bank lain. Tidak termasuk dalam liabilitas segera adalah utang bunga.

Jenis liabilitas segera antara lain: penutupan rekening deposito jatuh tempo; titipan nasabah; selisih lebih hasil penjualan agunan milik nasabah; dividen yang belum dibayarkan; liabilitas kepada pemerintah yang harus dibayar; sanksi liabilitas membayar kepada otoritas yang belum dibayarkan; gaji/honor/upah yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan. Komponen-komponen tersebut apabila jumlahnya material dikelompokkan dalam pos tersendiri.

Transaksi liabilitas segera diakui pada saat liabilitas telah jatuh tempo; atau liabilitas menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak. Liabilitas segera dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

4). Utang

- Utang Bunga

Utang bunga merupakan seluruh liabilitas BPR berupa liabilitas bunga kepada nasabah yang belum dibayarkan dari simpanan berupa tabungan maupun deposito dari pihak ketiga bukan bank dan dari bank lain, pinjaman yang diterima dari bank, serta utang bunga lain.

Termasuk dalam pengertian utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti pinjaman yang diterima, dan pinjaman subordinasi. Utang bunga antara lain terdiri dari Liabilitas bunga yang telah menjadi beban BPR tetapi belum dibayar (akrual bunga). Bunga deposito yang telah jatuh tempo namun belum diambil oleh nasabah. Bunga dari transaksi lainnya yang sudah jatuh tempo namun belum diambil.

Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo. Penyajian Utang bunga disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

- Utang Pajak

Utang pajak adalah liabilitas pajak penghasilan badan yang terutang atas penghasilan BPR.

Dasar Pengaturan Utang Pajak ada pada SAK EP Bab 29 tentang Pajak Penghasilan dan juga PA BPR Bab XXIV tentang Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan.

4). Utang (Lanjutan)

Utang pajak mencakup utang pajak atas PPh Pasal 29 (PPh Badan) yang dihitung setelah berakhir masa pajak tahunan, yaitu selisih kurang kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan PPh Pasal 25 (angsuran pajak atau pajak dibayar di muka); dan/atau utang pajak yang telah ditetapkan oleh kantor pajak.

Utang Pajak diakui sebesar jumlah yang harus disetorkan ke kas negara. Penyajian Utang Pajak disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

3.6. Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

b. Liabilitas (lanjutan)

5). Pinjaman

Pinjaman yang diterima adalah pinjaman yang diterima dari bank, Bank Indonesia dan/atau pihak ketiga bukan bank dengan kewajiban pembayaran kembali berdasarkan persyaratan perjanjian utang piutang. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi kriteria subordinasi, antara lain bersifat junior dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal.

Pengukuran awal yaitu pinjaman diakui sebesar nilai sekarang kas terutang (sebagai contoh, termasuk pembayaran bunga dan pelunasan pokok). (Hal ini mengacu pada SAK EP Paragraf 11.13). Pengukuran selanjutnya pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pinjaman diterima dapat berasal dari bank umum, BPR lain, Bank Indonesia, atau pihak lain. Pinjaman diterima yang berasal dari Bank Indonesia berupa fasilitas pendanaan jangka pendek untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh BPR. Jenis pinjaman yang diterima antara lain: pinjaman bilateral; pinjaman sindikasi; pinjaman subordinasi; dan pinjaman khusus yang diterima dari lembaga pengayom maupun pinjaman dalam rangka linkage. Dalam ketentuan permodalan, pinjaman subordinasi masuk sebagai pinjaman dengan persyaratan tertentu sebagaimana POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR. Pinjaman yang diterima tidak termasuk: setoran keikutsertaan bank lain (bank peserta) dalam kredit sindikasi (pembiayaan bersama); atau dana yang diterima dalam rangka penerusan kredit (*channeling*).

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai pokok pinjaman ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman, dikurangi bunga dibayar di muka jika ada (diskonto). Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan pinjaman dan diskonto diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui sebagai beban bunga. Bunga akrual atas pinjaman diterima diakui sebagai utang bunga. Penyajian Pinjaman yang diterima disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan serta biaya transaksi dan diskonto yang belum diamortisasi. Bunga yang masih harus dibayar disajikan dalam pos utang bunga. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik oleh BPR disajikan sebagai tagihan komitmen pada pos fasilitas pinjaman diterima yang belum ditarik. Penempatan BPR berupa giro pada bank umum yang bersaldo kredit (*overdraft*) disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai pinjaman diterima.

6). Dana Setoran Modal-Liabilitas

Dana Setoran Modal (DSM) – Liabilitas adalah dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk penambahan modal, namun belum memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DSM – Liabilitas tidak memenuhi kriteria instrumen ekuitas karena masih terdapat unsur ketidakpastian di mana BPR tetap memiliki liabilitas kontraktual sehingga harus mengembalikan dana tersebut apabila tidak memenuhi ketentuan untuk diakui sebagai modal disetor sesuai dengan POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat. Dana setoran modal yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan kewajiban BPR kepada penyeter. Dana setoran modal yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan bagian dari ekuitas BPR.

Dana setoran modal yang diterima diakui sebagai DSM - Liabilitas. DSM - Liabilitas yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku diakui sebagai DSM - Ekuitas. Penyajian DSM – Liabilitas disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

3.6. Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

b. Liabilitas (lanjutan)

7). Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPRatas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1)b. Liabilitas imbalan kerja adalah liabilitas yang timbul dari imbalankerja.

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari: imbalan kerja jangka pendek; imbalan pascakerja; imbalan kerja jangka panjang lainnya; dan pesangon. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1)

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek: Secara umum diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto (*undiscounted amount*). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.5)

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah terdiskonto (*discounted amount*).

Khusus untuk liabilitas imbalan pascakerja program imbalan pastidan liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya, BPR mengukurliabilitas pada total neto dari jumlah nilai kini liabilitas imbalan, dikurangi nilai wajar aset program (jika ada),pada tanggal pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf28.15 dan 28.30).

Khusus untuk pesangon, BPR mengakui pesangon sebagai beban dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pesangon tidak memberikan manfaat ekonomik kepada BPR di masa depan.Pesangon diakui sebagai liabilitas dan beban hanya ketika BPR menunjukkan komitmennya untuk melakukan pemberhentian kontrak kerja sebelum tanggal pensiun normal, yang ditunjukkan dengan rencana formal terperinci untuk menghentikan pekerja dan tidak terdapat kemungkinan yang realistis untuk membatalkan rencana tersebut; atau memberikan pesangon sebagai hasil dari penawaran yang dilakukan untuk mendorong pengurangan tenaga kerja secara sukarela. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.34 dan 28.35)2). BPR mengukur pesangon pada estimasi terbaik dari pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban. Jika pesangon diberikan untuk mendorong pengurangan tenaga kerja secara sukarela, pengukuran pesangon didasarkan pada jumlah pekerja yang diperkirakan akan menerima tawaran tersebut. Jika pesangon jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, pesangon diukur pada nilai sekarang terdiskonto. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.36 dan 28.37).

Penyajian Liabilitas imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam posLiabilitas segera pada laporan posisi keuangan. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam pos liabilitas lainnya pada laporan posisi keuangan.

8). Liabilitas Lainnya

Liabilitas lainnya merupakan pos yang mencakup liabilitas BPR yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos liabilitas yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Termasuk dalam liabilitas lainnya antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Pengakuan dan Pengukuran Liabilitas lainnya diakui dalam hal BPR menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut dan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Penyajian Liabilitas lainnya disajikan dalam pos Liabilitas lain-lain pada laporan posisi keuangan.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. BPR mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktualnya (*substance over form*). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3 dan 22.4).

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

3.6. Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

c. Ekuitas (Lanjutan)

1). Modal

Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar.

Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif diterima BPR.

Agio yaitu selisih lebih tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

Modal sumbangan yaitu modal yang diterima BPR yang berasal dari sumbangan dalam bentuk dana atau aset lainnya.

2). DSM (Dana Setoran Modal) Ekuitas

DSM – Ekuitas yaitu dana yang telah disetor secara riil untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. (Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Perlakuan terhadap modal dilakukan sesuai ketentuan permodalan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang terkait perseroan terbatas, Undang-Undang terkait operasi, POJK mengenai BPR, dan POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.

Modal disetor diakui pada saat BPR menerima setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas untuk selanjutnya diukur pada nilai wajar yang telah dikurangi biaya transaksi, jika ada. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.7 dan 22.8).

3). Saldo Laba

Saldo laba (laba ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap (yang telah masuk sebagai bagian saldo laba).

Saldo laba umumnya dikelompokkan menjadi:

1) Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS.

2) Cadangan tujuan yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS.

3) Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:

a) laba tahun lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan

b) laba tahun berjalan.

Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan pembagian dividen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.

3.7. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

a. Penghasilan dan Beban

Penghasilan diakui BPR dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika telah terjadi peningkatan manfaat ekonomik masa depan terkait peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.41).

Penghasilan terdiri dari:

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

3.7. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Lanjutan)

a. Penghasilan dan Beban (Lanjutan)

1). Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga, yaitu pendapatan dari penanaman dana BPR dalam bentuk aset produktif; dan pendapatan lainnya, yaitu seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari perjanjian kredit diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

Pendapatan Bunga terdiri dari:

- Pendapatan bunga kontraktual, yaitu pendapatan bunga yang diterima oleh BPR sesuai dengan perjanjian dengan pihak lain atas surat berharga, penempatan pada bank lain, atau kredit yang diberikan (tidak termasuk amortisasi provisi atau biaya transaksi);
- Provisi kredit, yaitu pendapatan yang diterima BPR atas provisi kredit yang diberikan; Provisi diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi provisi tersebut diakui sebagai penambah pendapatan bunga. Amortisasi provisi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing. Pada saat kredit non-performing, BPR mengakui pendapatan dari amortisasi provisi.
- Biaya transaksi, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh BPR yang terkait secara langsung dengan penempatan sertifikat Bank Indonesia, penempatan pada bank lain serta kredit yang diberikan. Biaya transaksi mencakup semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya marketing fee. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit; dan Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi biaya transaksi tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan bunga. Amortisasi Biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing. Pada saat kredit non-performing, BPR mengakui pendapatan dari amortisasi biaya transaksi.
- Koreksi pendapatan bunga, yaitu koreksi pendapatan bunga akrual atas aset produktif yang mengalami penurunan kualitas atau penurunan nilai, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya berasal dari kegiatan jasa yang mendukung operasional BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat. Bentuk pendapatan lainnya antara lain:

- Pendapatan jasa transaksi (seperti payment point dan ATM);
- Keuntungan dari penjualan valuta asing;
- Keuntungan penjualan surat berharga;
- Penerimaan aset produktif yang dihapus buku;
- Pemulihan CKPN aset keuangan;

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

3.7. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Lanjutan)

a. Penghasilan dan Beban (Lanjutan)

1). Pendapatan Operasional (lanjutan)

- Dividen;
- Keuntungan dari penyertaan dengan equity method;
- Keuntungan penjualan AYDA;
- Pendapatan ganti rugi asuransi; dan
- Pemulihan penurunan nilai AYDA.

Pendapatan lainnya diakui pada saat memenuhi persyaratan sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.

2). Beban Operasional

Beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan usaha utama BPR.

Beban diakui BPR dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika telah terjadi penurunan manfaat ekonomik masa depan terkait penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.42).

Beban operasional diakui secara akrual, yaitu dampak daritransaksi dan peristiwa lainnya yang diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

Beban Operasional terdiri dari:

- Beban Bunga

Beban bunga, yaitu beban bunga atas kegiatan penghimpunan dana atau penerimaan pinjaman BPR, seperti tabungan atau deposito, pinjaman dari Bank Indonesia atau bank lain. Beban bunga termasuk amortisasi biaya transaksi dan provisi pinjaman yang diterima serta amortisasi biaya promosi yang dapat diatribusikan secara langsung pada rekening tabungan atau deposito. Beban bunga antar kantor tidak dilaporkan pada pos ini tetapi dilaporkan pada pos beban non operasional sesuai ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat;

- Beban kerugian restrukturisasi kredit

Beban kerugian restrukturisasi kredit, yaitu amortisasi cadangan kerugian yang timbul atas penurunan nilai kredit akibat restrukturisasi setelah diperhitungkan dengan kelebihan CKPN aset keuangan karena perbaikan kualitas kredit dalam rangka restrukturisasi;

- Beban kerugian penurunan nilai

Beban kerugian penurunan nilai, yaitu CKPN aset produktif antara lain berupa kredit yang diberikan, surat berharga yang dimiliki, dan penempatan pada bank lain. Detil mengenai kerugian penurunan nilai dapat merujuk standar akuntansi keuangan mengenai instrumen dasar. Pembentukan beban kerugian penurunan nilai sebesar nilai tercatat kredit yang diberikan tidak semata merupakan penghentian pengakuan karena BPR masih memiliki hak kontraktual atas penerimaan arus kas masa datang yang berasal dari kredit yang diberikan;

Beban kerugian penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan, BPR mengakui dan mengukur berdasarkan bukti objektif. Jika pada periode berikutnya, jumlah beban kerugian penurunan nilai menurun, maka BPR menyajikan jumlah perbaikan pada pemulihan CKPN pada pendapatan operasional lainnya.

- Beban pemasaran

Beban pemasaran, yaitu biaya yang berkaitan dengan promosi produk perbankan BPR antara lain biaya edukasi terhadap masyarakat tentang produk perbankan BPR, biaya pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan langsung pada rekening nasabah, dan biaya iklan untuk promosi;

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

3.7. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Lanjutan)

a. Penghasilan dan Beban (Lanjutan)

- Beban penelitian dan pengembangan

Beban penelitian dan pengembangan, yaitu biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR. Termasuk pada pos ini yaitu: (1) biaya perjalanan dan akomodasi terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR, (2) biaya penelitian dan pengembangan untuk pendirian dan pembukaan kantor cabang BPR, dan (3) beban pengeluaran yang terjadi secara internal pada suatu item aset takberwujud;

- Beban administrasi dan umum

Beban administrasi dan umum, termasuk beban tenagakerja, beban pendidikan & pelatihan, beban sewa, beban penyusutan/penghapusan atas aset tetap & inventaris, beban amortisasi aset tak berwujud, beban premi asuransi, beban pemeliharaan dan perbaikan, beban barang & jasa, beban penyelenggaraan, teknologi informasi, kerugian terkait risiko operasional, dan pajak-pajak;

- Beban lainnya

Beban lainnya, yaitu beban operasional lainnya termasuk kerugian penjualan valuta asing, kerugian penjualan surat berharga, kerugian dari penyertaan dengan equity method, kerugian penjualan AYDA, kerugian penurunan nilai AYDA, dan biaya pungutan OJK.

Beban - beban lain seperti beban pemasaran, beban penelitian dan pengembangan, dan beban administrasi dan umum diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

b. Pendapatan dan Beban Non Operasional

1). Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non operasional merupakan semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

Pendapatan Non operasional diakui sebesar jumlah yang menjadi hak BPR. BPR mengakui pendapatan Non operasional menggunakan dasar akuntansi akrual, yaitu diakui ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk akun tersebut.

Pendapatan Non Operasional terdiri dari:

- Keuntungan penjualan, yaitu keuntungan karena penjualan aset tetap dan inventaris milik BPR;

- Pemulihan penurunan nilai, termasuk penurunan nilai wajar atas aset tetap dan inventaris milik BPR yang sebelumnya telah mengalami penurunan nilai;

- Bunga antar kantor, yaitu pendapatan bunga yang berasal dari transaksi antarkantor. Pelaporan pendapatan bunga antarkantor untuk laporan perkantor dilaporkan secara tidak saling hapus dengan beban bunga antarkantor (*gross*), sedangkan untuk laporan gabungan disajikan secara saling hapus (*offsetting/net*);

- Selisih kurs, yaitu keuntungan selisih kurs berupa selisih lebih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya;

- Pendapatan lainnya, yaitu seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga yang tidak dapat dikelompokkan seperti di atas. Termasuk pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus tagih; sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

2). Beban Non Operasional

Beban Non operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

Beban nonoperasional diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Beban Non Operasional terdiri dari:

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

3.7. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Lanjutan)

b. Pendapatan dan Beban Non Operasional (Lanjutan)

2). Beban Non Operasional (Lanjutan)

- Kerugian penjualan/kehilangan, yaitu kerugian karena penjualan atau kehilangan aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Kerugian penurunan nilai, yaitu kerugian atas penurunan nilai wajar aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Bunga antar kantor, yaitu beban bunga atas dana yang berasal dari transaksi antar kantor. Pelaporan beban bunga antar kantor untuk keperluan laporan keuangan bertujuan umum secara gabungan disajikan secara saling hapus (offsetting/net);
- Selisih kurs, yaitu kerugian selisih kurs berupa selisih kurang antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya; dan
- Beban lainnya, termasuk sanksi administratif berupa denda karena suatu pelanggaran dan sumbangan yang diberikan BPR.

c. Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan

1). Pajak Kini

Pajak kini adalah pajak penghasilan terutang (dapat dipulihkan) terkait dengan laba kena pajak (rugi pajak) untuk periode berjalan atau periode lain. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1)

Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi BPR sebagai bagian dari biaya operasional. Pengakuan ini harus dilakukan pada periode pelaporan yang sesuai dengan prinsip akrual, yaitu beban pajak harus diakui pada saat pendapatan diperoleh atau biaya terjadi, bukan pada saat pembayaran dilakukan.

Beban pajak penghasilan diukur berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada periode pelaporan yang bersangkutan. Tarif pajak yang digunakan dapat berbeda tergantung pada jenis pendapatan atau pengeluaran, serta peraturan pajak yang berlaku.

2). Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah pajak penghasilan terutang atau dapat dipulihkan pada periode mendatang, umumnya sebagai hasil dari BPR memulihkan atau menyelesaikan aset dan liabilitas pada jumlah tercatat kini, dan dampak pajak dari akumulasi rugi pajak kini belum dikompensasi dan kredit pajak kini belum dimanfaatkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1)

Aset pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan temporer dapat dikurangkan di masa depan. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Aset pajak tangguhan juga diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.12 dan 29.21)

Liabilitas pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan temporer kena pajak.

Liabilitas dan aset pajak tangguhan diukur menggunakan tarif pajak dan undang-undang pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus pada jumlah neto Pajak Tangguhan.

Saat ini PT BPR Wuni Artha Utama tidak menyajikan Pajak Tangguhan dikarenakan berdasarkan hasil perhitungan CKPN terdapat selisih yang dianggap tidak material antara perhitungan PPKA dan CKPN sehingga Bank belum mengakui adanya pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak kini yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

3.7. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Lanjutan)

d. Laporan Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain adalah item penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi yang disyaratkan atau diizinkan oleh standar akuntansi keuangan.

Penghasilan komprehensif lain timbul dari poin dalam SAK EP Bab 5 Paragraf 5.4 (b). Umumnya pada BPR yang relevan hanya terkait surplus revaluasi aset tetap. Surplus revaluasi aset tetap tidak direklasifikasikan ke laba rugi. Umumnya pada BPR yang relevan hanya terkait surplus revaluasi aset tetap bila BPR memilih kebijakan akuntansi revaluasi untuk aset tetapnya (lihat bab IX tentang Aset Tetap dan Inventaris). Surplus revaluasi aset tetap tidak di reklasifikasikan ke laba rugi.

3.8 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyediakan informasi perubahan kas dan setara kas BPR untuk periode pelaporan. Laporan arus kas menunjukkan secara terpisah penerimaan dan pengeluaran kas BPR dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.1)

Aktivitas operasi adalah aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan bagi BPR dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang timbul dari perubahan dalam ukuran dan komposisi ekuitas dan pinjaman BPR yang dikontribusikan.

BPR menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung, dengan metode ini pos-pos utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.7)

Kas terdiri atas:

- 1) kas dalam rupiah dan kas dalam valuta asing;
- 2) rekening giro pada bank lain;
- 3) tabungan pada bank atau BPR lain.

b. Setara kas, antara lain:

- 1) surat berharga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;

3.9. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk suatu periode, item penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, dampak perubahan dalam kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui pada periode tersebut dan (tergantung pada format laporan dari perubahan ekuitas yang dipilih oleh BPR) jumlah transaksi dengan pemilik yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemilik selama periode tersebut.

3.10. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan BPR. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum BPR, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

3.11 Instrumen Keuangan

- Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada BPR dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lainnya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.3).
- BPR mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas keuangan sesuai dengan substansi pengaturan kontraktualnya dan tidak hanya dari bentuk hukumnya (substance over form). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3A).
- Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan jika BPR harus menyelesaikan kewajiban kontraktualnya melalui penyerahan kas atau aset lain. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3A).

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

3.12. Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode perhitungan biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode pengalokasian penghasilan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama umur instrumen keuangan ke jumlah tercatat aset atau liabilitas keuangan tersebut. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.16).

3.13. Pengukuran Aset Non Keuangan dan Liabilitas Non Keuangan

Pada pengakuan awal, BPR mengukur aset dan liabilitas pada biaya historis kecuali SAK EP mensyaratkan pengukuran awal dengan dasar lainnya seperti nilai wajar. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.46). Selanjutnya aset dan liabilitas diukur dengan dasar pengukuran lainnya sebagai berikut:

- Semisal Aset Tetap yaitu dengan model biaya, diukur pada yang lebih rendah antara biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai dengan jumlah terpulihkan; atau Model revaluasi, diukur pada yang lebih rendah antara jumlah revaluasi dan jumlah terpulihkan.
- BPR mengakui kerugian penurunan nilai terkait aset nonkeuangan yang digunakan atau dikuasai untuk dijual, sebagai contoh aset yang diambil alih.
- SAK EP mengizinkan atau mensyaratkan pengukuran pada nilai wajar untuk: investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang diukur BPR pada nilai wajar; properti investasi yang diukur BPR pada nilai wajar; dan aset tetap yang diukur BPR dengan model revaluasi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.50).
- Kebanyakan liabilitas selain liabilitas keuangan diukur pada estimasi terbaik atas jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.51).

3.14. Pengukuran Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Pada pengakuan awal, BPR mengukur aset dan liabilitas keuangan pada biaya historis kecuali SAK EP mensyaratkan pengukuran awal dengan dasar lainnya seperti nilai wajar. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.46) Selanjutnya aset dan liabilitas diukur dengan dasar pengukuran lainnya sebagai berikut:

- BPR mengukur aset keuangan dasar dan liabilitas keuangan dasar pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*) dikurangi penurunan nilai. Pengukuran ini dikecualikan untuk: investasi dalam saham preferen yang tidak dapat dikonversi; dan saham biasa atau saham preferen tanpa opsi jual yang diperdagangkan secara publik atau yang nilai wajarnya dapat diukur dengan andal tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Investasi dan saham di atas diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.47).
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi kecuali disyaratkan lain oleh SAK EP. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.48)
- Biaya perolehan diamortisasi aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah nilai bersih dari: jumlah saat pengakuan awal; dikurangi setiap pelunasan pokok; ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif; dan dikurangi penurunan nilai (untuk aset keuangan). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.15).

3.15. Saling Hapus

- BPR tidak diperbolehkan melakukan saling hapus aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban. Saling hapus hanya diperbolehkan dalam rangka penyajian untuk transaksi yang memiliki sifat yang sama, sebagai contoh keuntungan selisih kurs dan kerugian selisih kurs.
- Pengukuran aset secara neto dengan nilai penyisihan bukan merupakan saling hapus.
- Jika aktivitas operasi normal BPR tidak mencakup pembelian atau penjualan aset tidak lancar, maka BPR melaporkan Keuntungan dan kerugian pelepasan aset tersebut dengan cara mengurangi hasil pelepasan dengan jumlah tercatat asetnya dan beban penjualan terkait.
(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.52)

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

3.16 Pihak-Pihak yang Berelasi

Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas dari harga yang dibebankan. Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang biasanya terjadi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Transaksi antara entitas dengan pemilik utamanya
- Transaksi antara entitas dengan entitas lain dimana kedua entitas tersebut dibawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu
- Transaksi dimana entitas atau individu yang mengendalikan entitas pelapor menimbulkan beban secara langsung yang bukan ditanggung oleh entitas pelapor

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Kas

Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut ini:

	2025	2024
Kas		
- Kas Besar	174.054.800	208.641.350
Saldo Kas	174.054.800	208.641.350

4.2 Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada Bank Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 terinci berikut ini:

	2025	2024
Giro Pada Bank Lain terdiri dari:		
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng Norek 1.009.00898.1	-	210.340.891
- PT. Bank SMBC, Tbk Norek 00193005187	10.002.157	-
Saldo Giro	10.002.157	210.340.891

Tabungan Pada Bank Lain terdiri dari:

- PT. Bank Mandiri Tbk Norek 138.00.0630271.0	1.852.595.874	1.575.808.557
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng Norek 2.009.01498.8	610.164.389	520.741.643
- PT. BPD Bank Jawa Barat dan Banten Tbk 008.0870.833.100	-	1.917.518.566
- PT Bank Negara Indonesia	1.307.314.582	-
- PT. Bank Muamalat Norek 526.001.545.0	1.300.424.256	1.251.515.909
- PT. Bank Muamalat Norek 526.001.295.0	335.035.797	-
Saldo Tabungan	5.405.534.898	5.265.584.675

Deposito Berjangka Pada Bank Lain terdiri dari:

- PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng (APEX) No Bilyet 105230	30.000.000	30.000.000
- PT. BPR Ceper No Bilyet 001418	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT. BPR Kedung Arto	-	500.000.000
Saldo Deposito Berjangka	1.030.000.000	1.530.000.000
Saldo Penempatan Pada Bank Lain	6.445.537.055	7.005.925.566

Cadangan Kerugian Penurunan nilai Penempatan Pada Bank Lain

Adapun rincian pembentukan penyisihan penempatan pada bank lain adalah :

Saldo Awal tahun	-	(912)
Pembentukan CKPN Tahun Berjalan	662.849	-
Penyisihan (pemulihan) beban CKPN	(662.849)	912
Saldo akhir	-	-

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.3 Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan per 31 Desember 2025 dan 2024 terinci berikut ini:

	2025	2024
Kredit Yang Diberikan Kepada pihak III terdiri dari:		
- Kredit Umum	22.243.653.267	21.815.878.360
- Kredit Karyawan Umum	104.800.903	236.164.800
- Kredit Deposito PNM	-	2.147.834
- Provisi	(64.927.804)	(87.833.557)
- Pendapatan Bunga Ditangguhkan	(15.545.717)	(31.756.044,00)
Saldo Kredit Yang Diberikan	22.267.980.649	21.934.601.393

Kredit Yang Diberikan berdasarkan kolektibilitas terdiri dari:

- Lancar	13.025.155.596	10.080.444.444
- Dalam Perhatian Khusus	2.484.018.901	6.711.746.715
- Kurang Lancar	2.510.924	1.080.959.027
- Diragukan	1.526.612.989	1.192.016.841
- Macet	5.310.155.760	2.989.023.967
Saldo Kredit Yang Diberikan	22.348.454.170	22.054.190.994

Kredit berdasarkan sektor ekonomi

- Rumah Tangga Untuk Pemilikan Peralatan Lainnya	341.307.874	1.407.107.211
- Rumah Tangga Untuk Keperluan Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain	6.459.470	10.000.000
- Bukan Lapangan Usaha Lainnya	1.681.651.034	701.523.512
- Pertanian Buah pisang	147.500.000	147.500.000
- Pertanian Padi	557.995.425	470.066.951
- Peternakan Unggas	33.581.294	98.599.000
- Peternakan Domba & Kambing	-	15.586.000
- Penangkapan Ikan Lainnya	3.165.000	3.165.000
- Peternakan Lainnya	-	172.731.618
- Industri Tempe Dan Tahu Kedelai	124.000.000	122.265.000
- Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	849.160.745	850.000.000
- Industri Produk Makanan Lainnya	-	56.329.900
- Industri Barang Lainnya Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	-	363.889
- Industri Barang Tanah Liat / Keramik Bukan Bahan Bangunan	117.434.126	114.167.500
- Industri Pengecoran Besi Dan Baja	46.338.103	43.749.700
- Industri Semen, Kapur dan Gips	49.792.182	90.000.000
- Industri Pengolahan Lainnya	726.625.949	2.020.347.523
- Konstruksi Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.209.740.140	41.200.000
- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	33.089.447	39.086.000
- Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	1.446.781.850	-
- Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau	-	68.808.500
- Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi	11.561.278.496	13.037.647.942
<i>Jumlah dipindahkan</i>	18.935.901.135	19.510.245.246

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.3 Kredit yang Diberikan (lanjutan)

<i>Jumlah pindahan</i>	<u>18.935.901.135</u>	<u>19.510.245.246</u>
- Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian di Toko	-	126.116.000
- Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Lainnya di Toko	125.145.371	-
- Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya	132.688.878	250.000.000
- Angkutan Darat Untuk Barang	114.093.088	128.128.100
- Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	763.575.952	394.818.600
- Penyediaan Akomodasi Lainnya	187.997.726	1.480.612
- Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya	-	-
- Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ytdl	7.584.226	17.204.000
- Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan	-	-
- Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	2.081.467.794	1.626.198.436
- Real estate Lainnya	-	-
Saldo Kredit yang Diberikan	<u>22.348.454.170</u>	<u>22.054.190.994</u>

Kredit Yang Diberikan berdasarkan hubungan keterkaitan terdiri dari:

- Kredit -Terkait	22.748.941	55.831.950
- Kredit - Tidak Terkait	<u>22.325.705.229</u>	<u>21.998.359.044</u>
Saldo Kredit yang Diberikan	<u>22.348.454.170</u>	<u>22.054.190.994</u>

Informasi kredit yang diberikan kepada pihak terkait adalah sebagai berikut:

No	No Rekening	Nama	Nominal	Hubungan Keterkaitan
1	1.03.03.05.2337-10	Erna Wulandari	22.748.941	PE Audit Intern
	Total		<u>22.748.941</u>	

4.3 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit Yang diberikan

- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit Yang Diberikan	<u>121.070.614</u>	<u>134.549.914</u>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	<u>121.070.614</u>	<u>134.549.914</u>

Adapun rincian pembentukan CKPN kredit yang diberikan adalah :

Saldo Awal tahun	134.549.914	211.093.551
Pembentukan CKPN Tahun Berjalan	68.664.271	83.041.128
Penyisihan (pemulihan) beban CKPN	(45.738.630)	(159.584.765)
Penyesuaian CKPN laba ditahan	(36.404.941)	-
Saldo akhir	<u>121.070.614</u>	<u>134.549.914</u>

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

4.3 Kredit yang Diberikan- Lanjutan

Tingkat Suku Bunga

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 103A/SK-DIR/BPR-WAU/VII/2025 tertanggal 29 Juli 2025, tarif bunga pinjaman sebagai berikut:

No	Jenis Fasilitas Kredit	Suku Bunga Per Bulan	Keterangan
1	Fasilitas Angsuran Pokok dan Bunga	0,8 % s.d 1,2%	Suku Bunga Flat (Disetarakan Efektif)
2	Fasilitas Bunga Menurun	1,25% s.d 1,5%	Suku Bunga Floating Rate (FR)

4.4 Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Agunan Yang Diambil Alih per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

	2025	2024
Agunan Yang Diambil Alih	-	160.000.000
Jumlah Ayda	-	160.000.000

4.5 Aset Tetap dan Inventaris

Rincian dari aset tetap dan inventaris per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

2024

Keterangan	Saldo 31 Des 2024	Mutasi		Saldo 31 Des 2025
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Peralatan dan Perlengkapan	414.455.800	35.600.000	9.750.000	440.305.800
Kendaraan	502.460.000	272.800.000	204.100.000	571.160.000
Jumlah	916.915.800			1.011.465.800
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan perlengkapan	370.645.473	18.341.903	9.750.000	379.237.376
Kendaraan	402.698.314	74.310.451	204.100.000	272.908.765
Jumlah	773.343.787		213.850.000	652.146.141
Nilai Buku	143.572.013			359.319.659

Adapun penambahan inventaris pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Harga Perolehan	Tgl perolehan
1	Handphone Android Samsung A06 4/64	1.600.000	26-Feb-25
2	Notebook HP 14s-dq5120TU	9.500.000	4-Aug-25
3	Neon Box Double Sisi & Tiang (Papan Nama BPR)	4.500.000	15-Aug-25
4	Genset Type KDG12STA1 Kisuba Silent Diesel	20.000.000	13-Nov-25
5	1 Unit Mobil Avanza	272.800.000	3 Juli 2025

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

4.5 Aset Tetap- Lanjutan

Keterangan	Saldo 31 Des 2023	2024		Saldo 31 Des 2024
		Mutasi		
		Penambahan	Penambahan	
Harga Perolehan				
Peralatan dan Perlengkapan	485.395.650	17.408.000	88.347.850	414.455.800
Kendaraan	481.830.000	20.630.000	-	502.460.000
Jumlah	967.225.650		88.347.850	916.915.800
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan Perlengkapan	437.532.093	21.461.230	414.455.800	44.537.523
Kendaraan	339.612.469	63.085.845		402.698.314
Jumlah	777.144.562		414.455.800	447.235.837
Nilai Buku	190.081.088			469.679.963

4.6 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset tidak berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Aset Tidak Berwujud	56.810.000	56.810.000
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(48.364.179)	(38.039.175)
Saldo Aset Tidak Berwujud	<u>8.445.821</u>	<u>18.770.825</u>

PERJANJIAN KERJASAMA
PT PENTA MEDIA INFORMASI
DENGAN
PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI "PENTA SYSTEM UNTUK BPR"
Nomor: 014/PKS/PM-INFO/IV/2022

Perjanjian kerjasama tentang Implementasi aplikasi Penta System untuk BPR ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, 13 April 2022 bertempat di Kab. Sukoharjo, oleh dan antara:

Pihak Pertama/PT. Penta Media Informasi

Nama : Muhammad Rizal, M.Kom dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak secara sah untuk dan atas nama PT. Penta Media Informasi

Alamat : Perum Sanggrahan Permai, Jl. Benowo 05, No. 14 Makamhaji, Sukoharjo

Pihak Kedua/PT. BPR Wuni Artha Utama

Nama : Guntur Wijayanto, SE dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak secara sah untuk dan atas nama PT. BPR Wuni Artha Utama

Alamat : Jl. Raya Klaten-Solo Km 8 Meger, Ceper, Klaten

Objek : Menyusun dan implementasi Penta System versi BPR

Jangka Waktu : perjanjian implementasi ini berlaku selama 1 tahun yaitu sejak tanggal 13-04-2022 sampai dengan tanggal 12-04-2023

Biaya : besarnya biaya sistem dan implementasi ditetapkan sebesar Rp 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk PPN 10%

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

4.7 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Beban Dibayar Dimuka		
- Sewa Kantor	178.041.258	3.750.000
- Premi Asuransi	-	4.585.797
- Lainnya	20.500.000	
Lainnya		
- Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima-PPBL	42.339	1.953.629
- Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima-Kredit	224.242.841	236.816.783
- PPOB	13.882.067	5.240.000
- Biaya Lelang	14.230.000	10.677.510
- Pajak Dibayar Dmuka	-	2.591.762
Saldo Aset Lain-Lain	<u>450.938.505</u>	<u>265.615.481</u>

*** Perjanjian Sewa Menyewa**

Berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 14 Februari 2025 dengan no: 27/BPR-WAU/II/2025 adalah sebagai berikut:

Pihak Pertama/Yang Menyewakan

Nama : Fitri Rahayu, S.E.

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jambon RT. 16 RW. 07 Desa/Kelurahan Keden, Kecamatan Pedan, Klaten

Pihak Kedua/Penyewa

Nama : Febry Nurcahyo Alfath, S.E

Pekerjaan : Direktur PT. BPR Wuni Artha Utama berkedudukan di Kecamatan Ceper, Kabupaten

Alamat : Puro Asri 022/010 Puro Karangmalang, Sragen

Objek Sewa : Bangunan rumah yang berdiri diatas sebagian dari sebidang tanah Hak mllik Nomor: 1090, seluas 405 m2, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, Kecamatan Ceper, Kelurahan Meger dan diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10-2-1999 Nomor: 2/Meger/1999 sebagaimana ternyata dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada tanggal 26-07-2011 tercatat atas nama

Jangka Waktu Sewa : Jangka waktu sewa 3 tahun dimulai terhitung pada tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan 14 Februari 2028

Nilai Sewa : Rp 135.000.000,- (untuk jangka waktu 3 tahun)

4.8 Liabilitas Segera

Liabilitas Segera per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Liabilitas Segera		
- Liabilitas Segera - Pajak Atas Bunga Tabungan (PPH Pasal 4 ayat 2)	2.853.837	2.849.887
- Liabilitas Segera - Pajak Atas Bunga Deposito (PPH Pasal 4 ayat 2)	8.327.586	10.391.416
- Liabilitas Segera - Pajak Hadiah Undian	137.000	9.000
- Titipan Nasabah	1.917.000	12.000
- Liabilitas Segera - Lainnya (BPJS Tenaga Kerja)	5.617.348	4.807.793
- Liabilitas Segera - Lainnya (BPJS Kesehatan)	3.562.484	3.204.618
Saldo Liabilitas Segera	<u>22.415.255</u>	<u>21.274.714</u>

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

4.9 Simpanan

Simpanan per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
- Tabungan		
- Tabungan Umum	6.134.780.321	6.068.797.166
- Tabungan SIMPEL	101.166.818	114.206.891
Jumlah Simpanan Tabungan	<u>6.235.947.139</u>	<u>6.183.004.057</u>
- Deposito Berjangka		
- 3 Bulan	-	100.000.000
- 6 Bulan	2.602.000.000	2.652.000.000
- 12 Bulan	6.648.350.000	7.051.800.000
Jumlah Simpanan Deposito Berjangka	<u>9.250.350.000</u>	<u>9.803.800.000</u>
Saldo Simpanan	<u>15.486.297.139</u>	<u>15.986.804.057</u>

Tabungan berdasarkan hubungan keterkaitan terdiri dari:

- Tabungan -Terkait	1.005.151.421	649.352.894
- Tabungan - Tidak Terkait	5.230.795.718	5.533.651.163
Saldo Tabungan	<u>6.235.947.139</u>	<u>6.183.004.057</u>

Informasi simpanan tabungan kepada pihak terkait adalah sebagai berikut:

No	No Rekening	Keterangan	Nominal	Keterkaitan
1	2.02.01.0001	Drs Sunardi	160.229.988	Komisaris Utama dan Pemegang Saham
2	2.02.01.0002	Hardjono	295.052	Pemegang Saham
3	2.02.01.0004	Fitri Rahayu, SE	327.522.688	Komisaris Utama dan Pemegang Saham
4	2.02.01.0939	Rosa Ardianingrum	1.217.811	Anak Pemegang Saham
5	2.02.01.2646	Erri Herwanto	75.397.864	Adik Komisaris & Pemegang Saham
6	2.02.01.2676	Ardian Widyatmoko	89.332.699	Anak Komisaris Utama & Pemegang Saham
7	2.02.01.2934	Oktavia Kariola Sumartha Putri	93.187.605	Anak Komisaris & Pemegang Saham
8	2.02.01.2944	Abdullah Sjukur	214.213	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
9	2.02.01.3042	Tri Waluyo Indra Sanyoto	13.179.518	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
10	2.02.01.1748-02	Printi Astono	130.653	PE Kepatuhan & Manajemen Risiko
11	2.02.01.4222-00	Mutiara Maharani Sumarta Putri	170.329.439	Anak Komisaris & Pemegang Saham
12	2.02.01.5173-00	Suyanto	74.113.891	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
		Jumlah	1.005.151.421	

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

4.9 Simpanan - Lanjutan

Tingkat Suku Bunga Tabungan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 153/SK-DIR/WAU/X/2024 Tentang Tabungan Umum tertanggal 22 Oktober 2024, Suku bunga 3 % per tahun dihitung berdasarkan saldo harian.

	2025	2024
Deposito Berjangka berdasarkan hubungan keterkaitan terdiri dari:		
- Deposito Berjangka -Terkait	2.576.200.000	2.114.500.000
- Deposito Berjangka - Tidak Terkait	6.674.150.000	7.689.300.000
Saldo Deposito Berjangka	9.250.350.000	9.803.800.000

Informasi simpanan deposito kepada pihak terkait adalah sebagai berikut:

No	No Rekening	Nama	Nominal	Keterkaitan
1	2.02.02.0002	Hardjono	2.000.000	Pemegang Saham
2	2.02.02.0002-01	Hardjono	20.000.000	Pemegang Saham
3	2.02.02.0004-02	Fitri Rahayu SE	10.000.000	Komisaris & Pemegang Saham
4	2.02.02.0004-03	Fitri Rahayu SE	40.000.000	Komisaris & Pemegang Saham
5	2.02.02.0004-04	Fitri Rahayu SE	50.000.000	Komisaris & Pemegang Saham
6	2.02.02.0630	Sri Suryani	7.500.000	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
7	2.02.02.0630-01	Sri Suryani	60.000.000	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
8	2.02.02.2646	Erri Herwanto	20.000.000	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
9	2.02.02.2862	Nanik Hartati	100.000.000	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
10	2.02.02.2894	Anisah Susetyowati	40.000.000	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
11	2.02.02.2894-01	Anisah Susetyowati	30.000.000	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
12	2.02.02.2894-02	Anisah Susetyowati	100.000.000	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
13	2.02.02.2934	Oktavia Kariola Sumartha Putri	35.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
14	2.02.02.2934-01	Oktavia Kariola Sumartha Putri	25.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
15	2.02.02.2934-02	Oktavia Kariola Sumartha Putri	12.500.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
16	2.02.02.2934-03	Oktavia Kariola Sumartha Putri	20.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
17	2.02.02.2934-04	Oktavia Kariola Sumartha Putri	20.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

4.9 Simpanan - Lanjutan

Informasi simpanan deposito kepada pihak terkait adalah sebagai berikut (*lanjutan*):

18	2.02.02.2934-05	Oktavia Kariola Sumartha Putri	12.500.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
19	2.02.02.2934-06	Oktavia Kariola Sumartha Putri	100.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
20	2.02.02.2934-07	Oktavia Kariola Sumartha Putri	50.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
21	2.02.02.2934-08	Oktavia Kariola Sumartha Putri	75.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
22	2.02.02.2934-09	Oktavia Kariola Sumartha Putri	50.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
23	2.02.02.2934-10	Oktavia Kariola Sumartha Putri	20.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
24	2.02.02.2934-11	Oktavia Kariola Sumartha Putri	11.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
25	2.02.02.2934-12	Oktavia Kariola Sumartha Putri	55.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
26	2.02.02.3042-01	Tri Waluyo Indra Sanyoto	100.000.000	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
27	2.02.02.3042-02	Tri Waluyo Indra Sanyoto	100.000.000	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
28	2.02.02.3042-03	Tri Waluyo Indra Sanyoto	100.000.000	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
29	2.02.02.3042-05	Tri Waluyo Indra Sanyoto	100.000.000	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
30	2.02.02.3042-06	Tri Waluyo Indra Sanyoto	125.000.000	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
31	2.02.02.4222-00	Mutiara Maharani Sumarta Putri	50.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
32	2.02.02.4222-01	Mutiara Maharani Sumarta Putri	12.500.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
33	2.02.02.4222-02	Mutiara Maharani Sumarta Putri	12.500.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
34	2.02.02.4222-03	Mutiara Maharani Sumarta Putri	10.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
35	2.02.02.4222-04	Mutiara Maharani Sumarta Putri	100.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
36	2.02.02.4222-05	Mutiara Maharani Sumarta Putri	145.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
37	2.02.02.4222-06	Mutiara Maharani Sumarta Putri	50.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
38	2.02.02.4222-07	Mutiara Maharani Sumarta Putri	85.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
39	2.02.02.4222-08	Mutiara Maharani Sumarta Putri	10.700.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

4.9 Simpanan - Lanjutan

Informasi simpanan deposito kepada pihak terkait adalah sebagai berikut (*lanjutan*):

40	2.02.02.4222-08	Mutiara Maharani Sumarta Putri	60.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
41	2.02.02.5173-01	Suyanto	100.000.000	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
42	2.02.02.5173-02	Suyanto	150.000.000	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
43	2.02.02.5173-03	Suyanto	100.000.000	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
44	2.02.02.5173-04	Suyanto	100.000.000	Saudara Komisaris & Pemegang Saham
45	2.02.02.2676-05	Ardian Widyatmoko	100.000.000	Anak Komisaris & Pemegang Saham
Jumlah			2.576.200.000	

Tingkat Suku Bunga Deposito

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 154/SK-DIR/WAUX/2024 Tentang Deposito tertanggal 23 Oktober 2024, Suku bunga deposito adalah sebagai berikut:

No	Jangka Waktu	Suku Bunga
1	Jangka Waktu 6 Bulan	2% dibawah LPS
2	Jangka Waktu 12 Bulan	1% dibawah LPS

4.10 Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan Dari Bank Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
Simpanan Dari Bank Lain :		
- Deposito PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No 00580	2.000.000.000	2.000.000.000
Saldo Simpanan Dari Bank Lain	2.000.000.000	2.000.000.000

4.11 Kewajiban Imbalan Kerja

Kewajiban Imbalan Kerja per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
Kewajiban Imbalan Kerja		
- Kewajiban Imbalan Kerja	81.468.000	96.597.855
Saldo Kewajiban Imbalan Kerja	81.468.000	96.597.855

Catatan

Kewajiban Imbalan Pasca kerja (DPLK) sesuai dengan SK Direksi No. 147/SK-DIR/WAU/IX/2024 tertanggal 27 September 2024 yang berisi tentang jumlah iuran dan persyaratan lainnya. Pada tahun 2025 manajemen memutuskan untuk membentuk imbalan kerja dengan perhitungan sendiri sesuai dengan SK Direksi No: 062/S-DIR/BPR-WAU/V/2025. Namun Kewajiban Imbalan yang dibentuk saat ini merupakan cadangan THR.

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

4.12 Liabilitas Lain-lain

Saldo Liabilitas Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
Liabilitas Lain-lain		
- Cadangan Biaya Pendidikan	91.364.733	102.206.129
- Cadangan Dana Sosial	16.002.336	22.565.697
- Cadangan Biaya Seragam	2.965.515	4.734.425
- Cadangan Biaya KAP	7.100.000	7.469.369
- Cadangan Biaya Pemeliharaan System	-	9.000.000
- Cadangan CSR	29.278.996	28.749.357
- Titipan Notaris biaya APHT	54.942.799	29.636.949
- Cadangan Bingkisan Hari Raya Keagamaan	6.750.000	6.750.000
- Cadangan Penerimaan OJK	4.959.207	3.385.163
- Utang Bunga	22.623.784	26.303.978
- Utang Pajak	43.676.560	-
Saldo Liabilitas Lain-Lain	279.663.930	240.801.067

4.13 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
- Modal Dasar	10.000.000.000	10.000.000.000
- Modal yang belum disetor	(700.000.000)	(700.000.000)
- Modal disetor	9.300.000.000	9.300.000.000
Saldo Laba		
- Cadangan Umum	1.728.167.907	1.670.935.129
- Laba Belum Ditentukan Tujuannya:		
- Laba/Rugi Tahun Lalu	236.719.663	-
- Laba/Rugi Tahun Berjalan	450.473.981	286.163.892
Saldo Ekuitas	11.715.361.551	11.257.099.021

4.14 Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga periode Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
Pendapatan bunga penempatan pada bank lain:		
- Pendapatan Bunga Giro Bank Lain	1.849	-
- Pendapatan Bunga Tabungan Bank Lain		
- PT Bank SMBC, Tbk	308	-
- PT Bank Mandiri	13.158.555	15.268.767
- PT Bank BJB	23.386.291	17.254.181
- PT Bank Jateng	3.450.505	1.818.935
- PT Bank Muamalat	3.555.688	41.781.601
- PT Bank Muamalat	424.256	-
- PT Bank Negara Indonesia, Tbk	14.329.545	-
	58.305.148	76.123.484

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

4.15 Pendapatan Bunga - Lanjutan

	2025	2024
- Pendapatan Bunga Deposito Bank Lain		
- PT BPR Hardimas	9.937.500	
- PT BPR Kedung Arto	31.541.482	26.698.246
- PT Bank Jateng	1.216.864	1.292.705
- PT BPR Bank Ceper	62.417.748	65.193.579
Jumlah	<u>105.113.594</u>	<u>93.184.530</u>
Pendapatan bunga atas kredit yang diberikan:		
- Kredit Yang Diberikan		
- Bunga Pokok Kredit Umum	2.755.385.385	2.655.841.219
- Bunga Pokok Kredit Pensiun	93.072	3.774.348
- Bunga Pokok Kredit Karyawan Umum	48.645.844	54.030.450
- Bunga Pokok Kredit Deposito PNM	69.447	2.772.000
Jumlah	<u>2.804.193.748</u>	<u>2.716.418.017</u>
Jumlah Pendapatan Bunga	<u>2.967.614.339</u>	<u>2.885.726.031</u>

Pendapatan Provisi dan Administrasi adalah berikut ini:

- Pendapatan Provisi dan Administrasi Kredit		
- Pendapatan Provisi Dan Komisi Kredit		
- Provisi Kredit Umum	87.809.365	109.140.019
- Provisi Kredit Pensiun	1.752.313	93.750
- Provisi Kredit Karyawan Umum	6.539	2.338.257
- Provisi Kredit Deposito PNM	-	78.756
Jumlah Pendapatan Provisi Dan Administrasi Kredit	<u>89.568.217</u>	<u>111.650.782</u>

4.16 Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah berikut ini:

	2025	2024
- Penerimaan Kredit Yang Di Hapus Buku	300.000	1.100.000
- Pendapatan Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
- Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PPBL	662.849	912
- Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit	45.738.630	159.584.765
- Lainnya		
- Pendapatan Administrasi Kredit Lainnya	219.328.914	229.995.633
- Pendapatan Denda Kredit	93.911.969	122.182.060
- Pendapatan Administrasi Tabungan/Tutup Tabungan	29.525.247	29.504.679
- Pendapatan Pinalti Deposito	120.000	6.840.000
- Pendapatan Lainnya (Realisasi Kredit)	22.692.956	38.862.923
- Pendapatan pembulatan	-	4
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	<u>412.280.565</u>	<u>588.070.976</u>

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

4.17 Beban Bunga

Beban bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 terinci berikut ini:

	2025	2024
- Beban Bunga Kontraktual		
- Beban Bunga Deposito Berjangka		
Beban Bunga Deposito Berjangka 3 bulan	229.839	48.903.175
Beban Bunga Deposito Berjangka 6 bulan	139.736.704	143.278.396
Beban Bunga Deposito Berjangka 12 bulan	414.282.711	456.066.100
- Beban Bunga Tabungan		
Beban Bunga Tabungan Umum	182.165.717	239.433.786
Beban Bunga Tabungan SIMPEL	2.059.124	1.405.100
- Beban Bunga Simpanan Dari Bank Lain		
Beban Bunga Deposito	128.798.349	143.671.269
- Beban Bunga Pinjaman yang Diterima	-	-
Beban Bunga Dari Bank Lain	-	46.285.060
Lainnya	33.451.556	40.410.390
- Biaya Transaksi Kepada Bank Lain	-	11.945.835
- Beban Kerugian Pelunasan Kredit	222.777.379	-
Jumlah Beban Bunga	1.123.501.379	1.131.399.111

4.18 Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah berikut ini:

	2025	2024
- Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit	68.664.271	83.041.128
- Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PPBL	662.849	-
Jumlah Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	69.327.120	83.041.128

4.19 Beban Pemasaran

Beban pemasaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah berikut ini:

	2025	2024
- Beban Pemasaran	19.046.500	33.274.000
Jumlah Beban Pemasaran	19.046.500	33.274.000

4.20 Beban Administrasi Umum

Beban Administrasi Umum, utk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 terinci berikut ini :

	2025	2024
- Beban Tenaga Kerja		
- Gaji Pokok	854.627.848	878.182.716
- Tunjangan-Tunjangan		
Tunjangan Hari Raya (THR)	71.816.098	129.008.831
DPLK	7.000.000	48.750.000
PPh 21 Pengurus	29.782.991	20.144.850
Honor Tenaga Kontrak	44.500.000	13.200.000
Honor Lainnya (Satpam - Jaga Malam)	53.165.662	54.460.912
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>1.060.892.599</i>	<i>1.143.747.309</i>

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan		
4.20 Beban Administrasi Umum		
- Beban Tenaga Kerja - <i>Lanjutan</i>		
<i>Jumlah pindahan</i>	<u>1.060.892.599</u>	<u>1.143.747.309</u>
Uang Kehadiran Karyawan	-	20.680.000
Tunjangan Perumahan	10.000.002	
- Honorarium	294.752.000	296.636.200
- Lainnya		
Uang Lembur	14.893.719	27.290.113
Pakaian Dinas	9.000.000	8.250.000
Insentif Marketing	40.477.056	73.469.431
Lainnya	12.719.051	29.626.751
Sewa Kendaraan Marketing	238.000	317.000
Sub Jumlah Beban Tenaga Kerja	<u>1.442.972.427</u>	<u>1.600.016.804</u>
- Beban Pendidikan		
- Beban Pendidikan	48.000.504	54.238.308
Sub Jumlah Beban Pendidikan	<u>48.000.504</u>	<u>54.238.308</u>
- Beban Sewa		
- Beban Sewa Gedung Kantor / Pos Pelayanan	49.860.725	45.000.000
- Beban Sewa Kendaraan	-	-
- Beban Sewa Lainnya	5.432.600	5.414.600
Sub Jumlah Beban Sewa	<u>55.293.325</u>	<u>50.414.600</u>
- Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris		
- Beban Penyusutan Aset Tetap		
- Beban Penyusutan Peralatan dan Perlengkapan	18.341.903	21.461.230
- Beban Penyusutan Kendaraan	74.310.451	63.085.845
Sub Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	<u>92.652.354</u>	<u>84.547.075</u>
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	10.325.004	10.325.004
Sub Jumlah Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	<u>10.325.004</u>	<u>10.325.004</u>
- Beban Premi Asuransi		
- Premi Asuransi Lainnya	6.674.839	8.804.254
Sub Jumlah Beban Premi Asuransi	<u>6.674.839</u>	<u>8.804.254</u>
- Beban pemeliharaan dan perbaikan kantor		
- Perawatan Inventaris	3.555.000	2.192.500
- Perawatan Kendaraan	11.570.623	12.484.629
- Perawatan Lainnya	13.200.000	28.200.000
Sub Jumlah Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor	<u>28.325.623</u>	<u>42.877.129</u>
- Pajak-Pajak non PPh		
- Pajak Kendaraan Bermotor	6.592.000	6.944.500
- Pajak Lainnya	684.374	1.190.582
Sub Jumlah Beban Pajak Non Pph	<u>7.276.374</u>	<u>8.135.082</u>

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan		
4.20 Beban Administrasi Umum - Lanjutan		
- Beban Barang dan Jasa		
- Alat Tulis dan Kantor (ATK)	12.778.500	13.865.000
- Bahan Bakar	28.982.730	35.162.073
- Telepon	7.334.669	7.334.807
- Listrik	12.139.900	14.587.750
- Rumah Tangga	6.041.700	5.395.700
- Materai	1.200.000	1.010.000
- Biaya Jamuan	2.500.730	2.133.200
- Uang Kehadiran	9.557.500	-
- Lainnya	29.296.157	38.882.723
Sub Jumlah Beban Barang dan Jasa	109.831.886	69.344.180
Jumlah Beban Administrasi Umum	1.801.352.336	1.928.702.436
4.21 Beban Operasional Lainnya.		
Beban operasional lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:		
	2025	2024
Beban Operasional Lainnya.		
- Administrasi Bank	646.900	607.800
- Fee	14.687.718	15.271.572
- Pungutan OJK	13.321.164	19.065.476
- Rugi Penjualan AYDA	40.000.000	-
- Lainnya	10.354.746	-
Jumlah Beban Operasional Lainnya.	79.010.528	44.544.848
4.22 Pendapatan (Beban) Non Operasional		
Pendapatan (Beban) non operasional untuk periode yg berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:		
	2025	2024
Pendapatan Non Operasional		
- Pendapatan Keuntungan Penjualan Aset	121.600.000	-
- Pendapatan Non Operasional lainnya	11.693.295	11.733.271
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	133.293.295	11.733.271
Beban Non Operasional		
- Biaya Non Operasional Lainnya	4.368.012	5.660.000
Jumlah Beban Non Operasional	4.368.012	5.660.000
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	128.925.283	6.073.271
4.23 Beban Pajak Kini		
Jumlah Beban Pajak Kini yang dibentuk oleh BPR untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:		
	2025	2024
Taksiran Pajak Penghasilan	55.676.560	35.368.572
Laba Sebelum Pajak	506.150.541	321.532.464

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

4.23 Beban Pajak Kini - Lanjutan

Peredaran Bruto :		
- Pendapatan Bunga	2.967.614.339	2.885.726.031
- Pendapatan Provisi dan Administrasi	89.568.217	111.650.782
- Pendapatan Operasional Lainnya	412.280.565	588.070.976
- Pendapatan Non Operasional	133.293.295	11.733.271
Jumlah Peredaran Bruto	3.602.756.416	3.597.181.060
Laba Fiskal	506.150.541	321.532.464
Beban Pajak Penghasilan		
Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas (4.800.000.000/Peredaran Bruto) X Laba Fiskal	506.150.541	321.532.464
Penghasilan Kena Pajak tidak yang memperoleh fasilitas		-
Laba Yang Dikenakan tarif 50% x 22% x Penghasilan Kena Pajak	55.676.560	35.368.571
Laba Yang Dikenakan tarif 100% x 22% x Penghasilan Kena Pajak		-
Jumlah Beban Pajak Kini	55.676.560	35.368.571
Beban Pajak Kini Yang dibentuk BPR	55.676.560	35.368.572
Selisih	(0)	(1)
<u>Masa Pajak PPh 25</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Januari		1.647.426
Februari	3.000.000	7.789.109
Maret	3.000.000	8.634.481
April	3.000.000	-
Mei		1.408.311
Juni	500.000	4.417.857
Juli	500.000	-
Agustus	500.000	3.527.717
September	500.000	2.172.772
Oktober	500.000	5.154.527
Nopember	500.000	3.208.134
Jumlah SSP PPh 25 Januari s/d November	12.000.000	37.960.334
Pajak Lebih (Kurang) Bayar	55.676.560	2.591.762
PPh 25 Bulan Desember yang dibayarkan bulan Januari		-
PPh Lebih (Kurang) Bayar PPh 29	(43.676.560)	2.591.762
Utang Pajak PPH Ps 29 Badan	(43.676.560)	-
Selisih	-	-

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan

4.24 Rekening Administratif

Rekening Administratif per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Tagihan Kontinjensi		
Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
- Bunga Kredit yang Diberikan	1.329.844.935	517.506.427
Aktiva Produktif yang Dihapusbukukan		
- Kredit yang Diberikan	66.978.900	67.215.500
- Penempatan pada Bank Lain		
- Pendapatan Bunga Atas Kredit Yang Dihapusbukukan	77.410.350	84.811.850
Jumlah Kontinjensi	<u>1.474.234.185</u>	<u>669.533.777</u>

4.25 Penyajian Kembali Laporan keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2025, PT BPR Wuni Artha Utama telah menerapkan SAK Entitas Privat (SAK EP). Sesuai dengan ketentuan transisi, Bank menerapkan perubahan kebijakan akuntansi ini secara prospektif yaitu BPR menerapkan penyesuaian saldo laba awal secara prospektif untuk mencerminkan dampak kumulatif dari perubahan estimasi kerugian kredit ekspektasi. Penyesuaian ini mencakup evaluasi terhadap histori gagal bayar debitur selama 3 tahun terakhir untuk memastikan posisi permodalan saat ini mencerminkan risiko riil yang ada. Manajemen telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap klasifikasi instrumen keuangan dan pos-pos lainnya untuk memastikan kesesuaian dengan klasifikasi yang diatur dalam SAK EP. Berdasarkan Bab 35 SAK EP tentang "Penyajian Kembali", Bank telah melakukan penyesuaian terhadap saldo awal posisi keuangan sebagai berikut:

1. PT BPR Wuni Artha Utama mereklasifikasi Perhitungan Penyisihan Aset Produktif (PPKA) menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk mencerminkan evaluasi penurunan nilai berdasarkan bukti objektif sesuai
2. Pendapatan bunga yang akan diterima direklasifikasi kedalam akun Aset Lain-lain untuk memenuhi definisi penyajian sesuai kerangka baru.
3. Utang Bunga dan Utang pajak direklasifikasi kedalam akun Liabilitas Lain-lain untuk memenuhi definisi penyajian sesuai kerangka baru.
4. Selisih antara pengukuran aset keuangan berdasarkan SAK ETAP dan SAK EP pada tanggal transisi diakui langsung pada saldo Laba Ditahan sebesar Rp 36.404.941,-.

Keterangan	Saldo SAK ETAP	Penyesuaian/Reklasifikasi	Saldo SAK EP
PPAP Kredit	134.549.914	134.549.914 -	-
CKPN Kredit	-	134.549.914	134.549.914
Aset Lain-lain	26.845.069	238.770.412,00	265.615.481
Pendapatan Bunga Yang Akan	238.770.412	238.770.412	-
Utang Bunga	26.303.978	26.303.978	-
Liabilitas Lain-lain	214.497.089	26.303.978	240.801.067
CKPN	134.549.914	36.404.941	98.144.973
Laba Tahun Lalu	286.163.892	36.404.941	322.568.833

4.26 Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada peristiwa setelah tanggal Laporan Posisi keuangan yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, kecuali semua hal yang material yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan

LAMPIRAN

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
KUALITAS ASET PRODUKTIF
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Kredit	Penempatan pd Bank Lain	Jumlah 2025
1. ASET PRODUKTIF			
- Lancar	13.025.155.596	5.445.537.055	18.470.692.651
- Dalam Perhatian Khusus	2.484.018.901	-	2.484.018.901
- Kurang lancar	2.510.924	-	2.510.924
- Diragukan	1.526.612.989	-	1.526.612.989
- Macet	5.310.155.760	1.000.000.000	6.310.155.760
JUMLAH	22.348.454.170	6.445.537.055	28.793.991.225
2. ASET PRODUKTIF YANG DIKUALIFIKASIKAN			
- Kurang lancar (50%)	1.255.462	-	1.255.462
- Diragukan (75%)	1.144.959.742	-	1.144.959.742
- Macet (100%)	6.310.155.760	-	6.310.155.760
JUMLAH	7.456.370.964		7.456.370.964
3. AGUNAN YANG DIPERHITUNGAN			
- Lancar	8.722.740.371	-	8.722.740.371
- Dalam Perhatian Khusus	2.080.742.042	-	2.080.742.042
- Kurang lancar	2.510.924	-	2.510.924
- Diragukan	1.329.742.706	-	1.329.742.706
- Macet	4.710.844.204	-	4.710.844.204
JUMLAH	16.846.580.247		16.846.580.247
4. PPAPWD (setelah diperhitungkan agunan)			
- Lancar (0,5%)	36.148.029	27.227.685	63.375.714
- Dalam Perhatian Khusus (3%)	12.098.306	-	12.098.306
- Kurang lancar (10%)	-	-	-
- Diragukan (50%)	98.435.142	-	98.435.142
- Macet (100%)	599.311.556	-	599.311.556
JUMLAH	745.993.032	27.227.685	773.220.718
5. CKPN			
- Lancar	1.750.213		1.750.213
- Perhatian Khusus	4.145.529		4.145.529
- Kurang Lancar	14.393		14.393
- Diragukan	11.695.359		11.695.359
- Macet	103.465.120		103.465.120
JUMLAH	121.070.614	-	121.070.614
PPKA yang wajib dibentuk bank			773.220.718
PPKA yang dibentuk bank			773.220.718
Selisih (kurang) lebih bentuk PPKA			0
RASIO - RASIO	Aset Produktif Yang Diklasifikasikan		
	Aset Produktif		25,90%
	Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		100,00%
	PPAP yang wajib dibentuk		
	NPL Bruto		6.839.279.673
	Rasio NPL Bruto		30,60%
	NPL Netto		6.724.104.801
Rasio NPL Netto		30,09%	

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Komponen	Nominal	PPAP KHUSUS	NOMINAL SETELAH DIKURANGI PPAP KHUSUS	BOBOT RESIKO (%)	JUMLAH ATMR 2025
1	Kas	174.054.800			0%	-
2	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-			0%	-
3	Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit.	350.000.000	-	350.000.000	0%	-
4	Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.				0%	-
5	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPR.		-	-	15%	-
6	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.	6.445.537.055	-	6.445.537.055	20%	1.289.107.411
7	Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah		-	-	20%	-
	a. Kredit kepada bank lain		-	-		-
	b. Kredit kepada Pemerintah Daerah		-	-		-
	c. Bagian Kredit yang dijamin oleh bank lain		-	-		-
	d. Bagian Kredit yang dijamin oleh Pemerintah Daerah		-	-		-
8	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit		-	-	20%	-
9	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia	7.841.148.202	9.644.183	7.831.504.019	30%	2.349.451.206
10	Kredit kepada BUMN/BUMD		-	-	50%	-
11	Bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen)		-	-	50%	-
12	Kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan.		-	-	50%	-

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)
31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Komponen	Nominal	PPAP KHUSUS	NOMINAL SETELAH DIKURANGI PPAP KHUSUS	BOBOT RESIKO (%)	JUMLAH ATMR 2025
13	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	2.145.123.009	1.368.976	2.143.754.033	50%	1.071.877.017
14	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria.	1.798.959.962	537.430	1.798.422.532	70%	1.258.895.772
15	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	79.799.182	18.283	79.780.899	70%	55.846.629
16	Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas	175.228.398	31.505	175.196.893	100%	175.196.893
17	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	5.923.668.624	-	5.814.198.387	100%	5.814.198.387
	a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo	2.254.687.613	73.168.290	2.181.519.323		
	b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	3.668.981.011	36.301.947	3.632.679.064		
18	Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud	367.765.480			100%	367.765.480
19	Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-			100%	-
20	Aset lain, selain angka 1 s.d angka 19	450.938.505			100%	450.938.505
	Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPKA Umum	25.752.223.217				12.833.277.300

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
PERMODALAN (CAR)
Per 31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KOMPONEN PERMODALAN	Jumlah Tiap Komponen	% Yang Diperhitungkan	Jumlah 2025
I MODAL INTI			
I.1 Modal Inti Utama			
1.1.1. Modal Disetor	9.300.000.000	100%	9.300.000.000
1.1.2. Cadangan Tambahan Modal			
1.1.2.1 Agio (Disagio)	-	100%	
1.1.2.2 Modal Sumbangan	-	100%	
1.1.2.3 Dana Setoran Modal - Ekuitas	-	100%	
1.1.2.4 Cadangan Umum	1.728.167.907	100%	1.728.167.907
1.1.2.5 Cadangan Tujuan	-	100%	
1.1.2.6 Laba (Rugi) tahun-tahun lalu	236.719.663	100%	236.719.663
1.1.2.7 Laba Tahun Berjalan	450.473.981	100%	450.473.981
1.1.2.8 Pajak Tangguhan -/-	-	100%	-
1.1.2.9 Goodwill -/-	-	100%	-
1.1.2.10 AYDA berupa tanah, bangunan dan/atau rumah			
1.1.2.10.1 Melampaui jangka waktu 1 sd 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	-	15%	-
1.1.2.10.2 Melampaui jangka waktu 3 sd 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	-	50%	-

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
PERMODALAN (CAR)
Per 31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KOMPONEN PERMODALAN	Jumlah Tiap Komponen	% Yang Diperhitungkan	Jumlah 2025
<i>Lanjutan</i>			
1.1.2.10.3 Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	-	100%	-
1.1.2.11 AYDA Selain Tanah /Bangunan -/-			
1.1.2.12.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	-	50%	-
1.1.2.12.2 Melampaui jangka waktu 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-	-	100%	-
1.1.2.11 Properti Terbengkalai			
1.1.2.12.1 Tanah/Bangunan jangka waktu 1-3 Tahun -/-		15%	-
1.1.2.12.2 Tanah/Bangunan jangka waktu 3-5 Tahun -/-		50%	-
1.1.2.12.3 Tanah/Bangunan jangka waktu >5 Tahun -/-		100%	-
1.1.2.12 Selisih Kurang CKPN dan PPKA			652.150.104
Sub Total Cadangan Tambahan Modal	2.415.361.551		1.763.211.447
Jumlah Modal Inti Utama	11.715.361.551		11.063.211.447
I.2 Modal Inti Tambahan	-	100%	
I.3 JUMLAH MODAL INTI (I.1 + I.2)			11.063.211.447
II. MODAL PELENGKAP			
II.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu	-	Paling tinggi 50% dari modal inti	
II.2 Keuntungan revaluasi aset tetap	-	100%	
II.3 PPAP umum	65.125.717	Paling tinggi 1,25% dari ATMR	65.125.717
II.4 JUMLAH MODAL PELENGKAP (II.1 + II.2 + II.3)		Paling tinggi 100% dari modal inti	11.128.337.164
III. JUMLAH MODAL (I.3 + II.4)			11.128.337.164

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
PERMODALAN (CAR)
Per 31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KOMPONEN PERMODALAN	Jumlah Tiap Komponen	% Yang Diperhitungkan	Jumlah 2025
<i>Lanjutan</i> Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPAP umum			12.833.277.300
Selisih lebih PPAP umum yang wajib dihitung dari batasan PPAP umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap (-)			
ATMR			
Rasio KPMM = Jumlah Modal / ATMR			86,71%
Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar 12% dari ATMR (%)			1.539.993.276
Rasio modal inti (%) = Jumlah modal inti / ATMR			86,21%
Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio modal inti sebesar 8% dari ATMR (%)			1.026.662.184

BMPK:

Pihak Terkait (10% * Modal)

1.112.833.716

Pihak Tidak Terkait (20% * Modal)

2.225.667.433

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA
RASIO KREDIT TERHADAP DANA DITERIMA
Per 31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN		SALDO
1	Simpanan Pihak ke 3	
a	Tabungan	6.235.947.139
b	Simpanan Berjangka (Deposito)	9.250.350.000
2	Pinjaman diterima bukan dari Bank > 3 bln	-
3	Deposito dan Pinjaman diterima dari bank lebih dari 3 bln	-
4	Modal Pinjaman	-
5	Modal Inti	-
Jumlah Dana yang Diterima		15.486.297.139
6	Aset Produktif (selain ABA)	
a	Kredit yang Diberikan	22.348.454.170
b	Kredit yang Diberikan kepada Bank Lain	-
c	Lainnya	-
Jumlah Aset Produktif		22.348.454.170,00
LDR (Aset Produktif / Dana yang Diterima)		144,31%

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA

LIKUIDITAS (CASH RATIO)

Per 31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	SALDO
1. Alat Likuid	
a. Kas	174.054.800
b. Antar Bank Aktiva	
- Giro	10.002.157
- Tabungan	5.405.534.898
- dikurangi Tabungan ABP	-
Selisih Tabungan antar bank	-
Jumlah Alat Likuid	5.589.591.855
2. Utang Lancar	
a. Kewajiban Segera	66.091.815
b. Simpanan Pihak ke 3	
- Tabungan	6.235.947.139
- Deposito Berjangka	9.250.350.000
- Simpanan Dari Bank Lain	-
- Pinjaman Dari Bank Lain lebih dari 3 bulan	-
Jumlah Utang Lancar	15.552.388.954
CASH RATIO	35,94%

PT BPR WUNI ARTHA UTAMA

ROA, BOPO Dan NIM

Per 31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BULAN	TOTAL ASET 2025
Januari	29.545.706.623
Pebruari	29.628.591.745
Maret	28.973.189.411
April	29.306.410.731
Mei	29.361.364.441
Juni	28.990.099.733
Juli	29.853.244.647
Agustus	29.253.514.989
September	29.560.876.357
Oktober	29.888.913.293
Nopember	29.424.685.163
Desember	29.585.205.875
TOTAL	353.371.803.008

Laba sebelum pajak	506.150.541
Rata-rata Aset	29.447.650.251
ROA	1,72%
Biaya Operasional	3.092.237.863
Pendapatan Operasional	3.469.463.121
BOPO	89,13%
Pendapatan Bunga Bersih	1.933.681.177
Rata-rata Aset Produktif	28.803.428.981
NIM	6,71%

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Opini Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik
01	Indarto Waluyo, M.Acc., Ak., CPA., CA., CPI.

Form D.00.00

Surat Pernyataan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025



PT. BPR WUNI ARTHA UTAMA

Jl. Raya Klaten - Solo Km. 08, Meger, Ceper, Klaten
Telp./Fax : (0272) 331032, E-mail : wuniarthautama@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Pebruono, S.E., M.M.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Nomor Identitas (KTP/ Passport)	: 3374061402660001
Alamat	: Perum Griya Laras Asri A.4 Ngrawan Kidul RT 003 RW 004, Bawen, Bawen, Semarang
Jabatan	: Direktur Utama

Dalam hal ini mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama [PT BPR Wuni Artha Utama] yang berkedudukan di [Klaten] (selanjutnya disebut Bank), dengan ini menyatakan:

- 1) kebenaran data dan/atau informasi Laporan Keuangan Tahunan BPR;
- 2) tanggung jawab penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan Bank; dan
- 3) hasil penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan Bank.

Penyampaian data dan/ atau informasi sebagaimana angka 2) dan angka 3) merupakan pemenuhan penyampaian laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan bank.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Klaten, 10 April 2026

Pebruono, S.E., M.M.
Direktur Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Informasi	Keterangan
Alamat	JL RAYA KLATEN - SOLO KM. 8, MEGER, CEPER, KLATEN
Nomor Telepon	(0272) 331032
Penjelasan Umum	Perkembangan Industri Jasa Keuangan, khususnya industri Bank Perekonomian Rakyat saat ini cukup dinamis. Tidak lepas dari semakin kompleksnya kegiatan usaha Perbankan yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Hal ini penting, mengingat Tata Kelola BPR atau Good Corporate Governance pada industri jasa keuangan menjadi suatu keharusan dalam rangka menjaga keberlangsungan dan perkembangan industri jasa keuangan pada saat ini dan dimasa yang akan datang.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	Berdasarkan hasil penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) PT BPR Wuni Artha pada periode semester dua Tahun 2025 yang mencakup penilaian atas struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola, serta hasil penerapan tata kelola, dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola BPR telah dilaksanakan secara cukup memadai dan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan tata kelola telah didukung oleh keberadaan kebijakan, pedoman, dan mekanisme kerja yang mengatur fungsi dan hubungan antara Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Proses pengambilan keputusan strategis telah dilakukan melalui RUPS dan rapat organ BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris. Namun demikian, hasil penilaian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian dan perbaikan, terutama terkait dengan pemenuhan struktur organ Direksi, penguatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi komunikasi kebijakan strategis kepada pegawai, serta penerapan dan pengungkapan benturan kepentingan secara lebih konsisten. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penerapan tata kelola PT BPR Wuni Artha belum sepenuhnya optimal, namun masih berada pada kondisi yang dapat diperbaiki melalui komitmen manajemen dan tindak lanjut yang berkesinambungan, sehingga diharapkan pada periode berikutnya kualitas penerapan tata kelola dapat meningkat sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
------	---------	--------------------------

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

--

Keterangan

--

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Rekomendasi kepada Direksi		
Keterangan		

Form E.02.03
Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program
Kerja Komite



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
--------	--------------------------	---------------	-----------	--------------

Saat ini BPR belum mempunyai Komite (Sesuai ketentuan Peraturan OJK bahwa BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,-(Lima Puluh Miliar Rupiah) tidak wajib memiliki Komite).

Form E.02.04
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	

Sesuai ketentuan peraturan saat ini BPR belum mempunyai Komite.

Form E.03.01
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentaase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Dewan Komisaris				

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			
Pemegang Saham			

Form E.03.03
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
Anggota Direksi			
Anggota Dewan Komisaris			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Hubungan Keuangan		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
	Anggota Direksi		
	Anggota Dewan Komisaris		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Hubungan Keluarga		
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
	Anggota Direksi		
	Anggota Dewan Komisaris		
	Pemegang Saham		

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	1	39.000.000	2	120.000.000
Tunjangan	1	75.950.400	2	176.066.400
Tantiem	1	0	2	11.446.556
Kompensasi berbasis saham	1	0	2	0
Remunerasi lainnya	1	0	2	0
Total Remunerasi		114.950.400		307.512.956
Jenis Fasilitas Lain				
Perumahan	1	40.000.000	2	0
Transportasi	1	272.800.000	2	0
Asuransi Kesehatan	1	0	2	0
Fasilitas Lain-Lainnya	1	0	2	0
Total Fasilitas Lain		312.800.000		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		427.750.400		307.512.956

Direktur Utama mulai menjabat pada tanggal 09 Juli 2025

Form E.06.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,96
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,11
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,48
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4,10

Sampai Bulan Desember 2025 Jabatan Direksi hanya ada 1 (satu), masih terdapat kekosongan Jabatan Direktur YMFK

Form E.07.01
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
16-01-2025	2	Evaluasi kinerja triwulan IV tahun 2024
23-04-2025	2	Evaluasi kinerja triwulan I tahun 2025
17-07-2025	2	Evaluasi kinerja triwulan II tahun 2025
27-10-2025	2	Evaluasi kinerja triwulan III tahun 2025

Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan secara Triwulanan

Form E.07.02
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Selama Tahun 2025 tidak ditemukan adanya penyimpangan internal (Internal Fraud).

Form E.09.00 Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	2	0

Selama Tahun 2025 ada permasalahan hukum yang dihadapi yaitu Nasabah Kredit a.n Wiji Lestari & Mariyati dengan dugaan penggelapan jaminan berupa BPKB (Fisik jaminan tidak diketahui keberadaannya).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
Fitri Rahayu, S.E.	Komisaris	Febry Nurcahyo Alfath, S.E.	Direktur	Sewa Gedung	149	Sewa Gedung Untuk Operasional BPR
Drs. Sunardi	Komisaris Utama	Pebruono, S.E., M.M.	Direktur Utama	Sewa Rumah	40	Sewa Rumah Untuk Direktur Utama

Selama tahun 2025 terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wuni Artha Utama

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
13-02-2025	01	Ajang Kreativitas Siswa/ Lomba Mewarnai	SD N 2 Jambukulon Ceper	300.000
05-06-2025	01	Sumbangan Bulan Dana PMI	PMI	200.000
24-08-2025	01	Jalan Sehat Warga	Karang Taruna Betro, Dlimas, Ceper	300.000
20-07-2025	01	Menyambut HUT RI ke-80	Karng Taruna Karangwuni Kulon	200.000
27-07-2025	01	Menyambut HUT RI ke-80	Karang Taruna Karangwuni Wetan	200.000
27-07-2025	01	Menyambut HUT RI ke-80	Karang Taruna Meger Baru	200.000
18-08-2025	01	Hari Jadi Kab. Klaten Ke 221 & HUT RI Ke 80	Karang Taruna Ceper	100.000
24-08-2025	01	Jalan sehat Warga Menyambut HUT RI Ke-80	Karang Taruna Desa Meger	100.000

Selama Tahun 2025 BPR telah ikut serta peduli terhadap lingkungan sekitar dan akan selalu berkelanjutan.



PT. BPR WUNI ARTHA UTAMA

Jl. Raya Klaten - Solo Km. 08, Meger, Cepet, Klaten
Telp./fax : (0272) 331032, E-mail : wuniarthautama@yahoo.co.id

Nomor : 042/BPR-WAU/IV/2026
Lampiran : 1 (Satu) buku
Perihal : Laporan Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT BPR Wuni Artha Utama

Kepada Yth :

Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Jln Slamet Riyadi Nomor 328, Sriwedari
Laweyan, Solo

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor:12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perseorangan Rakyat, Maka dengan ini kami sampaikan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Wuni Artha Utama – Klaten. Periode Januari s.d Desember 2025 Sebagaimana terlampir.

Demikian laporan kami, mohon menjadikan periksa.

Klaten, 22 April 2026
PT. BPR Wuni Artha Utama

(Pebruono, S.E. M.M.)
Direktur Utama



PT. BPR WUNI ARTHA UTAMA

Jl. Raya Klaten - Selo Km. 08, Meger, Ceper, Klaten
Telp./Fax : (0272) 331032, E-mail : wuniarthautama@yahoo.co.id

Nomor : 043/BPR-WAU/IV/2026
Lampiran : 1 (Satu) buku
Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Wuni Artha Utama-Klaten.

Kepada Yth :

Pimpinan Perbarindo Pusat Dan Media BPR
KOMP.PATRA II No.46
Jl.Jend Ahmad Yani Bypass,
RT 15 RW 03 Cempaka Putih Timur
Cempaka Putih,Jakarta

Dengan Hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Wuni Artha Utama-Klaten Periode Januari s.d Desember 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian laporan kami mohon menjadikan periksa.

Klaten, 22 April 2026
PT. BPR Wuni Artha Utama


(Pebruono, S.E.M.M.)
Direktur Utama

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Dewan Komisaris PT BPR Wuni Artha Utama
2. Perbarindo DPD Jawa Tengah
3. Media BPR
4. Arsip

PenjelasanUmum

No	dalam	FlagDetail	Penggunaan	-/+	KodeKomponen	Alamat	NomorTelepon	PenjelasanUmum
1	Y	DD1	Single	-/+	000100000000	Jln.RayaKlaten-SoloKm.08, Meger,Ceper,Klaten	(0272)331032	Perkembangan industri Jasa Keuangan, khususnya industri Bank Perkonomian Rakyat saat ini cukup dinamis. Tidak lepas dari semakin kompleksnya kegiatan usaha perbankan yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Hal ini penting, mengingat Tata Kelola BPR atau Good Corporate Governance pada industri jasa keuangan menjadi suatu keharusan dalam rangka menjaga keberlangsungan dan perkembangan industri jasa keuangan pada saat ini dan dimasa yang akan datang. Penerapan tata kelola pada BPR (Bank Perkreditan Rakyat) secara garis besar dilakukan dengan berlandaskan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dalam praktiknya, pengelolaan BPR dilakukan melalui struktur organisasi yang jelas, dimana direksi bertanggung jawab atas operasional sehari-hari dan dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan. Selain itu, BPR wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta menerapkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai. Seluruh kegiatan operasional juga didukung dengan pelaporan yang transparan dan tepat waktu. Secara umum, penerapan tata kelola ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah serta memastikan kesehatan dan keberlangsungan usaha BPR.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Included dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Nama	NIK	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Y	D01	Multi	011000000000	Pebruono,S.E.,M.M.	3374061402660001'	0100	Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank secara profesional dan bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS serta mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar, Peraturan Perundangan dan Ketentuan Internal Bank.
2	Y	D01	Multi	011000000000				
3	Y	D01	Multi	011000000000				
5	Y	F01	Single	Footer1				
6	Y	F02	Single	Footer2				

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Nama	NIK	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Y	D01	Multi	01201000000	Drs.Sunardi	3310241206520001	0100	Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola bagi BP Rdalam setiap kegiatan usahabank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan nasehat kepada Direksi tentang kebijakan strategis Bank. Menyetujui RBB Bank yang disampaikan kepada OJK dan melaksanakan pengawasan RBB.
2	Y	D01	Multi	01201000000	Fitri Rahayu, SE	3310126402640001	0200	Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Audit Intern Bank, Audit Eksternal, Hasil pengawasan OJK, Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana strategis teknologi informasi dan kebijakan Bank terkait penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
3	Y	D01	Multi	01201000000				
5	Y	F01	Single	Footer1				
6	Y	F02	Single	Footer2				

TugasdanTanggungJawabKomite

No	IncludedalamFileTeks?	FlagDetail	Penggunaan	KodeKomponen	Komite	Status	TugasdanTanggungJawab
0	Y	D01	Multi	013101000000			
2	Y	D01	Multi	013101000000			
3	Y	D01	Multi	013101000000			
4	Y	F01	Single	Sesuai ketentuan peraturan, saat ini BPR belum mempunyai Komite.			

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Included dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
								Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	Y	000	Multi	013201000000							
2	Y	000	Multi	013201000000							
3	Y	000	Multi	013201000000							
4	Y	000	Single	Sesuai ketentuan peraturan insastini BPR belum mempunyai Komite							

Program KerjadanRealisasiProgramKerjaKomite

No	IncludedalamFileTeks?	FlagDetail	Penggunaan	KodeKomponen	Komite	Program	Realisasi	Jumlah
1	Y	D01	Multi	013301000000				
3	Y	D01	Multi	013301000000				
4	Y	F01	Single	Sesuaiketentuanperaturanfaatini BPRbelummempunyai Komite				

KepemilikanSahamAnggotaDireksipadaBPR

No	IncludedalamFileTeks?	FlagDetail	Penggunaan	KodeKomponen	NIK	Nominal(Rp)	PersentaseKepemilikan(%)
1	Y	D01	Multi	021010000000	3374061402660000	0	
2	Y	D01	Multi	021010000000			
3	Y	D01	Multi	021010000000			
4	Y	F01	Single	AnggotaDireksitidakmempunyaikepemilikansaham.			

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Included dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Y	D01	Multi	022010000000	3374061402660000			
2	Y	D01	Multi	022010000000				
3	Y	D01	Multi	022010000000				
4	Y	F01	Single	Anggota Direksi tidak mempunyai saham pada perusahaan lain.				

HubunganKeuanganAnggotaDireksipadaBPR

No	IncludeddalamFileTeks?	FlagDetail	Penggunaan	KodeKomponen	NIK	HubunganKeuangan		
						AnggotaDireksiLain	AnggotaDireksiLain	PemegangSaham
1	Y	D01	Multi	031010000000	3374061402660000			
2	Y	D01	Multi	031010000000				
3	Y	D01	Multi	031010000000				
4	Y	F01	Single	DireksiBPRtidakmempunyaihubungankeuangandenganpenguruslainnya.				

HubunganKeluargaAnggotaDireksipadaBPR

No	IncludedalamFileTeks?	FlagDetail	Penggunaan	KodeKomponen	NIK	HubunganKeuangan		
						AnggotaDireksiLain	AnggotaDireksiLain	PemegangSaham
1	Y	D01	Multi	03201000000	3374061402660000			
2	Y	D01	Multi	03201000000				
3	Y	D01	Multi	03201000000				
4	Y	F01	Single	TidakmemilikihubungankeluargaantaraDireksimaupunDewanKomisaris.				

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Included dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Y	D01	Multi	041010000000	3310241206520001	4325000000	46.51
2	Y	D01	Multi	041010000000	3310126402640001	3925000000	42.20
3	Y	D01	Multi	041010000000			
4	Y	F01	Single	Dua Anggota Dewan Komisaris memiliki total saham sebesar 88,71%.			

KepemilikanSahamAnggotaDewanKomisarispadaPerusahaanLain

No	IncludedalamFileTeks?	FlagDetail	Penggunaan	KodeKomponen	NIK	SandiBankLain	NamaPerusahaanLain	PersentaseKepemilikan(%)	
1	Y	D01	Multi	042010000000	3310241206520001				
2	Y	D01	Multi	042010000000	3310126402640001				
3	Y	D01	Multi	042010000000					
4	Y	F01	Single	DewanKomisaristidakmempunyai sahapada perusahaanlain.					

HubunganKeuanganAnggotaDewanKomisaris padaBPR

No	Included dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	NIK	Hubungan Keuangan		
						Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Y	D01	Multi	051010000000	3310241206520001			
2	Y	D01	Multi	051010000000	3310126402640001			
3	Y	D01	Multi	051010000000				
4	Y	F01	Single	Anggota Komisaris tidak ada hubungan keuangan antara Anggota Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham.				

HubunganKeluargaAnggotaDewanKomisarispadaBPR

No	IncludedalamFileTeks?	Flag Detail	Penggunaan	KodeKomponen	NIK	HubunganKeluarga		
						AnggotaDewanKomisarisLain	AnggotaDireksi	PemegangSaham
1	Y	D01	Multi	052010000000	3310241206520001			
2	Y	D01	Multi	052010000000	3310126402640001			
3	Y	D01	Multi	052010000000				
4	Y	F01	Single	TidakadahunbungankeluargaantaraDewanKomisaris,AnggotaDireksi maupunPemegangSaham.				

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Included dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
						Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Y	D01	Single	611	Gaji	1	39000000	2	120000000
2	Y	D01	Single	612	Tunjangan	1	75950400	2	176066400
3	Y	D01	Single	613	Tantiem				11446556
4	Y	D01	Single	614	Kompensasi berbasis saham				
5	Y	D01	Single	615	Remunerasi lainnya				
6	Y	D01	Single	616	Total		114950400		307512956
7	Y	F01	Single	Direktur Utama mulai menjabat pada tanggal 09 Juli 2025					

Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Included dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
						Direksi	Dewan Komisaris
1	Y	D01	Single	621	Perumahan	40000000	
2	Y	D01	Single	622	Transportasi	272800000	
3	Y	D01	Single	623	Asuransi Kesehatan		
4	Y	D01	Single	624	Fasilitas lainnya		
5	Y	F01	Single	Fasilitas untuk Direksi berupa rumah dinas, kendaraan dinas dan BPJS. Untuk Komisaris mendapat fasilitas BPJS			

RasioGajiTertinggidanGajiTerendah

No	IncludedalamFileTeks?	FlagDetail	Penggunaan	KodeKomponen	Keterangan	Perbandingan	
						(a/b)	1
1	Y	D01	Single	070100000000	Rasiogajipegawaiyangtertinggi(a)dangajipegawaiyangterendah(b)	1.96	1
2	Y	D01	Single	070200000000	RasiogajianggotaDireksiyangtertinggi(a)dangajianggotaDireksiyangterendah (b)	1	1
3	Y	D01	Single	070300000000	RasiogajianggotaDewanKomisarisiyangtertinggi(a)dangajianggotaDewanKomisarisiyangterendah(b)	1.11	1
4	Y	D01	Single	070400000000	RasiogajianggotaDireksiyangtertinggi(a)dangajianggotadewanKomisarisiyangtertinggi(b)	1.48	1
5	Y	D01	Single	070500000000	Rasiogaji anggotaDireksiyangtertinggi(a)dangajipegawai yangtertinggi(b)	4.10	1
6	Y	F01	Single	Footer1			

PelaksanaanRapatdalam1(satu) tahun

No	IncludeddalamFileTeks?	Flag Detail	Penggunaan	KodeKomponen	TanggalRapat	JumlahPeserta	Topik/MateriPembahasan
1	Y	D01	Multi	081010000000	20250116		2 EvaluasikinerjatriwulanIvtahun2024
2	Y	D01	Multi	081010000000	20250423		2 EvaluasikinerjatriwulanItahun2025
3	Y	D01	Multi	081010000000	20250717		2 EvaluasikinerjatriwulanItahun2025
3	Y	D01	Multi	081010000000	20251027		2 EvaluasikinerjatriwulanIItahun2025
4	Y	F01	Single	Pelaksanaanrapatdalam1(Satu)tahundilaksanakancaraTriwulanan			

KehadiranAnggotaDewanKomisaris

No	IncludedalamFileTeks?	FlagDetail	Penggunaan	KodeKomponen	NIK	FrekuensiKehadiran		TingkatKehadiran(Dalam%)	
						Fisik	Telekonferensi		
1	Y	D01	Multi	082010000000	3310241206520001	4	0	100.00	
2	Y	D01	Multi	082010000000	3310126402640001	4	0	100.00	
3	Y	D01	Multi	082010000000					
4	Y	F01	Single	Footer 1					

PermasalahanHukumyangDihadapi

No	IncludedalamFileTeks?	FlagDetail	Penggunaan	Kode Komponen	UraianPermasalahan	Jumlah(satuan)			
						Perdata	Pidana		
1	Y	D01	Single	1001	TelahSelesai(telahmempunyaikeuatanhukumyangtetap)	0	0		
2	Y	D01	Single	1002	DalamProsesPenyelesaian	2	0		
3	Y	D01	Single	1003	Total	2	0		
4	Y	F01	Single	SelamaTahun2025terdapatpermasalahanhukumyangdihadapiyaituNasabahkredita.nWijiLestari danMariatidengandugaanpenggelapanjaminanberupa					

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Included dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)	
1	Y	D01	Multi	120100000000	20250522	01	Kegiatan CS RTA 2025	Bulan Dana PMI Tahun 2025	200000	
2	Y	D01	Multi	120100000000	20251128	01	Kegiatan CS RTA 2024	Lomba Kreativitas Anak di SDI-PK Muhammadiyah Delanggu	400000	
3	Y	F01	Single	Selama Tahun 2025 BP Relah kutsertapeduliterhadaplingkungansekitardanakselaluberkelanjutan.						

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode Komponen	Nama BPR	Posisi Laporan	Alamat	Nomor Telepon	Modality BPR	Total Aset BPR	Bobot BPR	Status Audit Ekstern	Nilai Komposit	Peringkat Komposit	Analisis
1	Y	D01	Single	130100000000	BPR Wuni Artha Utama	20251231	Jln Raya Klaten-Solo Km 08, Meger, Ceper, klaten	(0272)-331032	11114017074	29602576712	B	1	033		Secara keseluruhan Penerapan Tata Kelola Bank berjalan dengan cukup baik, Manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dan telah mempersiapkan Struktur Tata Kelola yang mendukung seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang berkompetensi serta kebijakan dan prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas bank.

Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Tata Kelola

No	Induk di dalam File Tekst?	RagD etali	Penggunaan	*/	Kode ko mp onen	Faktor	Bobot faktor	Struktur	Proses P	Hasil H	Penjumlahan P + D + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
1	Y	D01	Single		0100	Faktor1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	117	085	022	234	047	BPR dengan modal nilai kurang dari Rp.50 M jumlah Direksi paling sedikit 2 (dua) Orang. Namun saat ini BPR memiliki 1 (satu) orang yang bertindak sebagai Direktur Utama dan saat ini terjadi kekosongan posisi Direktur YMK.
2	Y	D01	Single		0200	Faktor2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	111	085	020	216	032	Jumlah Dewan Komisaris 2 (dua) orang dan telah mengadakan rapat Komisaris minimal 4 kali setahun. Dan telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3	Y	D01	Single		0300	Faktor3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	000	000	000	000	000	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPR tidak berkewajiban memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
4	Y	D01	Single		0400	Faktor4: Penanganan benturan kepentingan	0.100	150	120	030	300	030	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan bagi Pengurus dan Pegawai BPR. Namun agar menjadi perhatian perlu review unit kepatuhan apabila ditemukan kejadian dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
5	Y	D01	Single		0500	Faktor5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0.100	140	128	037	305	031	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah menebak langkah langkah untuk memastikan BPR memenuhi seluruh peraturan OJK perundang undangan serta peraturan lain yang berlaku.
6	Y	D01	Single		0600	Faktor6: Penerapan fungsi audit intern	0.100	120	100	020	240	024	BPR telah memiliki kebijakan Audit intern dan sudah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Namun BPR belum secara berkelanjutan mempunyai program pengembangan SDM yang menargetkan Audit Intern dalam hal peningkatan mutu keterampilan.
7	Y	D01	Single		0700	Faktor7: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	150	080	025	255	006	BPR sudah melakukan pengujian audit kepada Akuntan Publik dan KAP dan telah memenuhi aspek legalitas pekerjaan jasa, ruang lingkup, standar profesional dan membangun komunikasi antara OJK dan KAP yang dimaksud namun dalam pelaksanaannya belum maksimal.
8	Y	D01	Single		0800	Faktor8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0.100	150	120	030	300	030	BPR sudah memiliki kebijakan dan prosedur penanganan risiko namun belum optimal dalam pemantauan terhadap pelaksanaan risiko appetite dan toleransi.
9	Y	D01	Single		0900	Faktor9: Batas maksimum pemberian kredit	0.075	100	080	020	200	015	BPR telah melakukan pengkajian dan evaluasi kebijakan, sistem dan prosedur BPR yang disesuaikan dengan peraturan perundang undangan. Serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian Kredit agar sesuai dengan ketentuan BMPK BPR.
10	Y	D01	Single		1000	Faktor10: Rencanan bisnis BPR	0.075	150	120	030	300	023	BPR telah menyusun RBT tahunan serta rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Namun belum maksimal dalam menggambarkan secara keseluruhan bisnis BPR. Namun ketergantungan, peningkatan dan pengembangan Dana Pihak Ketiga dan penyelesaian salankredit bermasalah.
11	Y	D01	Single		1100	Faktor11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,serta pelaporan internal	0.075	150	120	030	300	023	Laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
12	Y	D01	Single		1200	Nilai Komposit						261	
13	Y	D01	Single		1300	Peringkat Komposit						3	

13	Y	D01	Single	P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	3	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab cukup independen serta tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang.
14	Y	D01	Single	P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti sebagian besar temuan Audit Intern maupun Ekstern.
15	Y	D01	Single	P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi kepada Dewan Komisaris.
16	Y	D01	Single	P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
17	Y	D01	Single	P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan BPR.
18	Y	D01	Single	P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi internal dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Anggota Direksi telah membudayakan serta mendorong setiap pegawai BPR untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja dan kualitas individu.
19	Y	D01	Single	P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Anggota Direksi cukup mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
20	Y	D01	Single	P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etik kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki pedoman tata tertib kerja anggota Direksi.
21	Y	D01	Single	P010A	Total nilai skalapenerapan	19	
22	Y	D01	Single	P010B	Rata-rata	2.38	
23	Y	D01	Single	P010C	Bobot	0.40	
24	Y	D01	Single	P010D	Nilai Proses	0.95	
26	Y	D01	Single	H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
27	Y	D01	Single	H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi telah mengkomunikasikan kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
28	Y	D01	Single	H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinion yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan sudah didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinion (jika ada).
29	Y	D01	Single	H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Adanya peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan namun hasil yang belum cukup optimal.
30	Y	D01	Single	H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi telah menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR dan Kantor Media.
31	Y	D01	Single	H010A	Total nilai skalapenerapan	11	
32	Y	D01	Single	H010B	Rata-rata	2.20	
33	Y	D01	Single	H010C	Bobot	0.10	
34	Y	D01	Single	H010D	Nilai Hasil	0.22	

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Include dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	Kode	Komponen	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Y		Single		SO200	A. Struktur dan Infrastruktur/Tata Kelola		
2	Y	DD1	Single		SO201	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.		Anggota Dewan Komisaris BPR berjumlah 2 (dua) orang.
3	Y	DD1	Single		SO202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		Jumlah anggota Dewan Komisaris melebihi jumlah anggota Direksi
4	Y	DD1	Single		SO203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangannya jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS.
5	Y	DD1	Single		SO204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		Semua Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama.
6	Y	DD1	Single		SO205	BPR memiliki Komisaris Independen: <ul style="list-style-type: none"> Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 15% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		BPR memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
7	Y	DD1	Single		SO206	Dewan Komisaris memiliki pedoman tata tertib berkegiatan termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		Dewan Komisaris telah memiliki pedoman, tata tertib berkegiatan kerja dan waktu kerja.
8	Y	DD1	Single		SO207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada lembaga lainnya.
9	Y	DD1	Single		SO208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuarga atau emenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuarga dengan sesama Anggota Komisaris maupun Anggota Direksi.
10	Y	DD1	Single		SO209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keuarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendalian atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.		Sesuai ketentuan yang berlaku, BPR tidak mempunyai Komisaris Independen.
11	Y	DD1	Single		SO20A	Totals nilai asakal penerapan		2,00
12	Y	DD1	Single		SO20B	Rata-rata		2,22
13	Y	DD1	Single		SO20C	Bobot		0,50
14	Y	DD1	Single		SO20D	Nilai statistik		1,11
15	Y	DD1	Single		PO200	B. Proses Penerapan Tata Kelola		
16	Y	DD1	Single		PO201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atas usulan/terhadap pemenuhan ketuntasan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.
17	Y	DD1	Single		PO202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		Dewan Komisaris sudah melakukan pengawasan kepada Direksi.
18	Y	DD1	Single		PO203	Dewan Komisaris tidak terikat dalam pengambilan keputusan operasional BPR, kecuali dalam hal penyelesaian danak pada pihak terkait sebagai mana diatur dalam ketentuan mengenai pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		Dewan Komisaris tidak terikat dalam keputusan operasional BPR kecuali dalam hal penyelesaian danak pada pihak terkait.
19	Y	DD1	Single		PO204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal, hasil pengawasan atau hasil pemeriksaan, dan/atau hasil pengawasan notaris lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dan menghimpun hasil tindak lanjut temuan.		Dewan Komisaris sudah melakukan monitoring dan tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal.
20	Y	DD1	Single		PO205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dalam menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang di hadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		Dewan Komisaris telah hadir dalam penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris minimal 3 (tiga) bulan sekali.
21	Y	DD1	Single		PO206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suar terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan disenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		Dewan Komisaris telah melakukan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dengan musyawarah mufakat atau suar terbanyak jika terdapat perbedaan pendapat. Disenting Opinion.
22	Y	DD1	Single		PO207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangkan keuntungan BPR, serta tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi.
23	Y	DD1	Single		PO208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsinya dan mengemukakan tindakan lanjut Direksi.		Dewan Komisaris sudah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi WPK.
24	Y	DD1	Single		PO20A	Totals nilai asakal penerapan		1,75
25	Y	DD1	Single		PO20B	Rata-rata		2,13
26	Y	DD1	Single		PO20C	Bobot		0,42
27	Y	DD1	Single		PO20D	Nilai Proses		0,85
28	Y	DD1	Single		HO200	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (1)		
29	Y	DD1	Single		HO201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk disenting opinion yang terdapat jika terdapat perbedaan pendapat, serta didokumentasikan pada seluruh anggota Dewan Komisaris.		Hasil rapat Dewan Komisaris sudah dituangkan dalam risalah rapat dan terdokumentasikan dengan baik.
30	Y	DD1	Single		HO20A	Totals nilai asakal penerapan		2,00
31	Y	DD1	Single		HO20B	Rata-rata		2,00
32	Y	DD1	Single		HO20C	Bobot		0,10
33	Y	DD1	Single		HO20D	Nilai Hasil		0,20

Kelengkapan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

No	Included dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan*	Keterangan
1	T		Single			A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPR tidak berkewajiban memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
3	Y	D01	Single		S030A	Total nilai skalapenerapan	0	
4	Y	D01	Single		S030B	Rata-rata	0.00	
5	Y	D01	Single		S030C	Bobot	0.50	
6	Y	D01	Single		S030D	Nilai struktur	0.00	
7	T		Single			B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPR tidak berkewajiban memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
9	Y	D01	Single		P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPR tidak berkewajiban memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
10	Y	D01	Single		P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPR tidak berkewajiban memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
11	Y	D01	Single		P030A	Total nilai skalapenerapan	0	
12	Y	D01	Single		P030B	Rata-rata	0.00	
13	Y	D01	Single		P030C	Bobot	0.40	
14	Y	D01	Single		P030D	Nilai Proses	0.00	
15	T		Single			C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
16	Y	D01	Single		H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit internal dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPR tidak berkewajiban memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
17	Y	D01	Single		H030A	Total nilai skalapenerapan	0	
18	Y	D01	Single		H030B	Rata-rata	0.00	
19	Y	D01	Single		H030C	Bobot	0.10	
20	Y	D01	Single		H030D	Nilai Hasil	0.00	

*Hanya diisi oleh BPR dengan Bobot Faktor D, untuk Bobot Faktor A, B, C diisi dengan 0

Penanganan Benturan Kepentingan

No	Included dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S0400	A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	BPR telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur Penyelesaian mengenai benturan kepentingan bagi pengurus dan pegawai BPR.
3	Y	D01	Single		S040A	Total nilai skalapenerapan	3	
4	Y	D01	Single		S040B	Rata-rata	3.00	
5	Y	D01	Single		S040C	Bobot	0.50	
6	Y	D01	Single		S040D	Nilai struktur	1.50	
7	T		Single		P0400	B.Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Selama tahun 2025 terjadi dua kali benturan kepentingan.
9	Y	D01	Single		P040A	Total nilai skalapenerapan	3	
10	Y	D01	Single		P040B	Rata-rata	3.00	
11	Y	D01	Single		P040C	Bobot	0.40	
12	Y	D01	Single		P040D	Nilai struktur	1.20	
13	T		Single		H0400	C.Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
14	Y	D01	Single		H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Terdapat benturan kepentingan namun tidak mengurangi atau merugikan namun lebih kepada tatalaksana dan prosedur dari kegiatan tersebut.
15	Y	D01	Single		H040A	Total nilai skalapenerapan	3	
16	Y	D01	Single		H040B	Rata-rata	3.00	
17	Y	D01	Single		H040C	Bobot	0.10	
18	Y	D01	Single		H040D	Nilai struktur	0.30	

Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Included dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan*	Keterangan
1	T				S0500	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0501	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyalur dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	4	Saat inibelum terisi Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
3	Y	D01	Single		S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	4	Saat inibelum terisi Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
4	Y	D01	Single		S0503	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satu unit kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
5	Y	D01	Single		S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
6	Y	D01	Single		S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR sudah memiliki pedoman kerja intern bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
7	Y	D01	Single		S050A	Total nilai skala penerapan	14	
8	Y	D01	Single		S050B	Rata-rata	2.80	
9	Y	D01	Single		S050C	Bobot	0.50	
10	Y	D01	Single		S050D	Nilai struktur	1.40	
11	T				P0500	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
12	Y	D01	Single		P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	4	Saat inibelum terisi Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
13	Y	D01	Single		P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	4	Saat inibelum terisi Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
14	Y	D01	Single		P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	4	Saat inibelum terisi Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
15	Y	D01	Single		P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usahanya dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
16	Y	D01	Single		P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah melakukan review dan merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang sesuai Otoritas Jasa Keuangan.
17	Y	D01	Single		P050A	Total nilai skala penerapan	16	
18	Y	D01	Single		P050B	Rata-rata	3.20	
19	Y	D01	Single		P050C	Bobot	0.40	
20	Y	D01	Single		P050D	Nilai Proses	1.28	
21	T				H0500	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22	Y	D01	Single		H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR secara berkelanjutan meminimalkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
23	Y	D01	Single		H0502	Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	4	Saat inibelum terisi Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
24	Y	D01	Single		H0503	Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Saat inibelum terisi Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
25	Y	D01	Single		H050A	Total nilai skala penerapan	11	
26	Y	D01	Single		H050B	Rata-rata	3.67	
27	Y	D01	Single		H050C	Bobot	0.10	
28	Y	D01	Single		H050D	Nilai Hasil	0.37	

Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Included dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan*	Keterangan
1	T		Single		S0600	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0601	BPR dengan modal intipaling sedikit Rp50.000.000.000,00 (limapuluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal intikurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Sesuai peraturan yang berlaku, BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Audit Intern.
3	Y	D01	Single		S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinakan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utamad dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah memiliki pedoman kerja dan prosedur kerja.
4	Y	D01	Single		S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyalurandana).	3	Pejabat Eksekutif Audit Intern sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara independen.
5	Y	D01	Single		S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Dalam struktur organisasi Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
6	Y	D01	Single		S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR belum optimal dalam program pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi Audit Intern.
7	Y	D01	Single		S060A	Total nilai skala penerapan	12	
8	Y	D01	Single		S060B	Rata-rata	2.40	
9	Y	D01	Single		S060C	Bobot	0.50	
10	Y	D01	Single		S060D	Nilai struktur	1.20	
11	T		Single		P0600	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
12	Y	D01	Single		P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan dan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman kerja audit intern.
13	Y	D01	Single		P0602	BPR dengan modal intipaling sedikit Rp50.000.000.000,00 (limapuluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal intikurang dari Rp 50.000.000.000,00 (limapuluh milyar rupiah): diberikanskala penerapan Baik (nilai 2)	2	Sesuai ketentuan yang berlaku, BPR belum melakukan kaji ulang.
14	Y	D01	Single		P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Fungsi Audit Intern telah melaksanakan secara memadai dan independen mencakup persiapan audit sampai dengan tindak lanjut hasil audit.
15	Y	D01	Single		P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR melaksanakan peningkatan mutu SDM Fungsi Audit Intern melalui pelatihan secara berkelanjutan.
16	Y	D01	Single		P060A	Total nilai skala penerapan	10	
17	Y	D01	Single		P060B	Rata-rata	2.50	
18	Y	D01	Single		P060C	Bobot	0.40	
19	Y	D01	Single		P060D	Nilai Proses	1.00	
20	T		Single		H0600	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
21	Y	D01	Single		H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern secara periodik telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
22	Y	D01	Single		H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
23	Y	D01	Single		H0603	BPR dengan modal intipaling sedikit Rp50.000.000.000,00 (limapuluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangansesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal intikurang dari Rp 50.000.000.000,00 (limapuluh milyar rupiah): diberikanskala penerapan Baik (nilai 2)	2	Sesuai ketentuan yang berlaku, BPR saat ini dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,-
24	Y	D01	Single		H0604	BPR dengan modal intipaling sedikit Rp50.000.000.000,00 (limapuluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal intikurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangansesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
25	Y	D01	Single		H060A	Total nilai skala penerapan	8	
26	Y	D01	Single		H060B	Rata-rata	2.00	
27	Y	D01	Single		H060C	Bobot	0.10	
28	Y	D01	Single		H060D	Nilai Hasil	0.20	

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Included dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan *	Keterangan
1	T		Single		S0700	A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	3	BPR sudah melakukan penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP dan telah memenuhi aspek aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup, standar profesional dan membangun komunikasi antara OJK dan KAP yang dimaksud namun dalam pelaksanaannya belum maksimal.
3	Y	D01	Single		S070A	Total nilai skalapenerapan	3	
4	Y	D01	Single		S070B	Rata-rata	3.00	
5	Y	D01	Single		S070C	Bobot	0.50	
6	Y	D01	Single		S070D	Nilai struktur	1.50	
7	T		Single		P0700	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR sudah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta melalui persetujuan RUPS.
9	Y	D01	Single		P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
10	Y	D01	Single		P070A	Total nilai skalapenerapan	4	
11	Y	D01	Single		P070B	Rata-rata	2.00	
12	Y	D01	Single		P070C	Bobot	0.40	
13	Y	D01	Single		P070D	Nilai Proses	0.80	
14	T		Single		H0700	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Y	D01	Single		H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	Hasil audit dan management Letter disampaikan ke BPR tepat Waktu.
16	Y	D01	Single		H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit telah sesuai ketentuan OJK.
17	Y	D01	Single		H070A	Total nilai skalapenerapan	5	
18	Y	D01	Single		H070B	Rata-rata	2.50	
19	Y	D01	Single		H070C	Bobot	0.10	
20	Y	D01	Single		H070D	Nilai Hasil	0.25	

*Kolom skalapenerapan hanya dapat diisi dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.

-Jika form B.00.00 kolom VI diisi:

1. "B", "C", "D", maka kolom skalapenerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
2. "A" dan form B.00.00 kolom VII diisi sandi 1 maka kolom skalapenerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5;
3. "A" dan form B.00.00 kolom VII diisi sandi 2 maka kolom skalapenerapan wajib diisi 0.

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

No	Included dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan*	Keterangan
2	Y	D01	Single		S0801	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPR sudah menunjuk satu orang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
3	Y	D01	Single		S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		kebijakan Manajemen Risiko. Namun belum optimal dalam pemantauan terhadap dilimit dan toleransi
4	Y	D01	Single		S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		BPR sudah memiliki kebijakan dan prosedur tentang penetapan limit risiko namun belum optimal dalam pemantauan terhadap ketentuan risiko dan toleransi.
5	Y	D01	Single		S080A	Total nilai skala penerapan	3	
6	Y	D01	Single		S080B	Rata-rata	3	3,00
7	Y	D01	Single		S080C	Bobot	3	0,50
8	Y	D01	Single		S080D	Nilai struktur	3	1,50
10	Y	D01	Single		P0801	Direksi: a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		Direksi BPR sudah menyusun dan mengevaluasi pedoman penerapan manajemen risiko serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
11	Y	D01	Single		P0802	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		Komisaris BPR telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan memutuskan permohonan Direksi atas transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
12	Y	D01	Single		P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		BPR belum optimal dalam penetapan pemantauan limit risiko sesuai ketentuan Risk Appetite dan Risk Tolerance
13	Y	D01	Single		P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		namun belum maksimal dalam penerapan manajemen risiko dan pemantauan terhadap dilimit
14	Y	D01	Single		P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Namun belum melakukan pemantauan secara
15	Y	D01	Single		P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		Namun harus diperbaiki dalam penetapan Manajemen Risiko dan pemantauan terhadap dilimit
16	Y	D01	Single		P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jajaran organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		melakukan pengembangan budaya manajemen risiko serta kompetensi SDM melalui Pelatihan dan/atau sosialisasi. Namun dalam penerapannya belum
17	Y	D01	Single		P080A	Total nilai skala penerapan	3	21
18	Y	D01	Single		P080B	Rata-rata	3	3,00
19	Y	D01	Single		P080C	Bobot	3	0,40
20	Y	D01	Single		P080D	Nilai Proses	3	1,20
22	Y	D01	Single		H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Namun belum menggambarkan keadaan dalam penetapan
23	Y	D01	Single		H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Namun belum secara lengkap menyertakan evaluasi
24	Y	D01	Single		H080A	Total nilai skala penerapan	3	6
25	Y	D01	Single		H080B	Rata-rata	3	3,00
26	Y	D01	Single		H080C	Bobot	3	0,10
27	Y	D01	Single		H080D	Nilai Hasil	3	0,30

BatasMaksimumPemberianKredit

No	Included dalam File Teks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan*	Keterangan
1	T		Single		S0900	A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan per kreditan BPR.	2	BPR sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait dengan BMPK.
3	Y	D01	Single		S090A	Total nilai skala penerapan	2	
4	Y	D01	Single		S090B	Rata-rata	2.00	
5	Y	D01	Single		S090C	Bobot	0.50	
6	Y	D01	Single		S090D	Nilai struktur	1.00	
7	T		Single		P0900	B.Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
8	Y	D01	Single		P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah melakukan pengkinian dan evaluasi kebijakan, sistem dan prosedur BMPK yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
9	Y	D01	Single		P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	BPR dalam memberikan kredit kepada pihak terkait ataupun kredit besar sudah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK.
10	Y	D01	Single		P090A	Total nilai skala penerapan	4	
11	Y	D01	Single		P090B	Rata-rata	2.00	
12	Y	D01	Single		P090C	Bobot	0.40	
13	Y	D01	Single		P090D	Nilai Proses	0.80	
14	T		Single		H0900	C.Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Y	D01	Single		H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah melakukan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
16	Y	D01	Single		H0902	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
17	Y	D01	Single		H090A	Total nilai skala penerapan	4	
18	Y	D01	Single		H090B	Rata-rata	2.00	
19	Y	D01	Single		H090C	Bobot	0.10	
20	Y	D01	Single		H090D	Nilai Hasil	0.20	

Rencana BisnisBPR

No	Included dalam FileTeks?	Flag Detail	Penggunaan	-/+	Kode Komponen	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan*	Keterangan
1	T		Single		S1000	A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
2	Y	D01	Single		S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	3	Direksi BPR sudah menyusun RBB dan sudah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Visi Misi BPR.
3	Y	D01	Single		S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyusun RBB tahunan serta rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Namun belum maksimal dalam menggambarkan secara keseluruhan bisnis BPR utamanya Peningkatan Dana Pihak Ketiga dan penyelesaian kredit bermasalah.
4	Y	D01	Single		S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat modal dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Rencana Bisnis BPR belum sepenuhnya didukung oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat modal dan infrastruktur yang memadai. Terutama dalam hal kekurangan SDM (Unit Bisnis).
5	Y	D01	Single		S100A	Total nilai skalapenerapan	9	
6	Y	D01	Single		S100B	Rata-rata	3.00	
7	Y	D01	Single		S100C	Bobot	0.50	
8	Y	D01	Single		S100D	Nilai struktur	1.50	
9	T		Single		P1000	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Y	D01	Single		P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Rencana Bisnis BPR disusun dengan mempertimbangan faktor intern, eksternal serta prinsip kehati-hatian.
11	Y	D01	Single		P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan secara menyeluruh atas Rencana Bisnis BPR.
12	Y	D01	Single		P100A	Total nilai skalapenerapan	6	
13	Y	D01	Single		P100B	Rata-rata	3.00	
14	Y	D01	Single		P100C	Bobot	0.40	
15	Y	D01	Single		P100D	Nilai Proses	1.20	
16	T		Single		H1000	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
17	Y	D01	Single		H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	perubahannya telah disampaikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
18	Y	D01	Single		H100A	Total nilai skalapenerapan	3	
19	Y	D01	Single		H100B	Rata-rata	3.00	
20	Y	D01	Single		H100C	Bobot	0.10	
21	Y	D01	Single		H100D	Nilai Hasil	0.30	

TransparansiKondisiKeuangandanNonKeuangan

No	IncludeddalamFileTeks?	FlagDetail	Penggunaan	-/+	KodeKomponen	Kriteria/Indikator	SkalaPenerapan*	Keterangan
1	T		Single		S1000	A.StrukturdanInfrastrukturTataKelola(S)		
2	Y	D01	Single		S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sisteminformasimanajemen yang memadaisesuaiketentuan termasuk sumberdaya manusia yangkompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistim pelaporan keuangan dan nonkeuanganBPRdidukungolehsisteminformasi manajemen yang cukup memadaidanSDMcukupkompeten.
3	Y	D01	Single		S110A	Totalnilaikalapenerapan	3	
4	Y	D01	Single		S110B	Rata-rata	3.00	
5	Y	D01	Single		S110C	Bobot	0.50	
6	Y	D01	Single		S110D	Nilaistruktur	1.50	
7	T		Single		P1100	B.ProsesPenerapanTataKelola (P)		
8	Y	D01	Single		P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikitmemuat laporan keuangan, informasilainnya, susunan pengurus dan komposisipemegangsaham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyusun laporankeuanganpublikasisetiaptriwulanseuaidengan ketentuan OtoritasJasaKeuangan.
9	Y	D01	Single		P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum,laporan keuangan, opinidariakuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR(apabilaada),seluruhaspektransparansidaninformasi,sertaseluruhaspekpengungkapanseuai ketentuanOtoritas JasaKeuangan.	3	BPRtelahmenyusunlaporantahunanase suai dengan ketentuan OtoritasJasaKeuangan.
10	Y	D01	Single		P1103	BPR melaksanakan transparansiinformasimengenaiproduk, layanan dan/atau penggunaandata nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.	3	BPR sudah melaksanakantransparansiinformasidanpenggunaan data nasabah yangberpedomankepadaketentuanOJK.
11	Y	D01	Single		P1104	BPRmenyusun dan menyajikanlaporan dengan tatacara, jenis dancakupan sebagaimana diaturdalamketentuanOtoritasJasaKeuangan.	3	LaporanBPRdisusundandisajikan sesuai denganketentuan OJK.
12	Y	D01	Single		P110A	Totalnilaikalapenerapan	12	
13	Y	D01	Single		P110B	Rata-rata	3.00	
14	Y	D01	Single		P110C	Bobot	0.40	
15	Y	D01	Single		P110D	NilaiProses	1.20	
16	T		Single		H1100	C.HasilPenerapanTataKelola(H)		
17	Y	D01	Single		H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasiditandatangani paling sedikit oleh 1(satu)anggotaDireksidengan mencantumkan namasecarajelas sertadisampaikan secaralengkapdan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OtoritasJasaKeuangan.	3	Laporan Tahunan dan LaporanPublikasiditandatanganiolehDireksisecaralengkapdan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK.
18	Y	D01	Single		H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dantindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secaratepatwaktu.	3	Laporanpengaduanandantindaklanjutdisampaikan ke Otoritas JasaKeuangan.
19	Y	D01	Single		H110A	Totalnilaikalapenerapan	6	
20	Y	D01	Single		H110B	Rata-rata	3.00	
21	Y	D01	Single		H110C	Bobot	0.10	
22	Y	D01	Single		H110D	NilaiHasil	0.30	

